

**ANALISIS WACANA KRITIS PADA PEMBERITAAN
KENAIKAN PPN 12% DI MEDIA ONLINE
KOMPAS.COM**

TUGAS AKHIR

Oleh:

MAULANA ISMAIL
2103110099

**Program Studi Ilmu Komunikasi
Konsentrasi Jurnalistik**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : Maulana Ismail
NPM : 2103110099
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Pada Hari, Tanggal : Selasa, 22 April 2025
Waktu : Pukul 08.15 WIB s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Assoc. Prof. Dr. Faustyna, S.Sos., M.M., M.I.Kom. (.....)

PENGUJI II : Akhyar Anshori, S.Sos., M.I.Kom. (.....)

PENGUJI III : Assoc. Prof. Dr. Ribut Priadi, S.Sos., M.I.Kom. (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Assoc.,Prof., Dr., Arifin Saleh., S.Sos., MSP Assoc.,Prof., Dr., Abrar Adhani., S.Sos., M.I.Kom



BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama Lengkap : Maulana Ismail
NPM : 2103110099
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Analisis Wacana Kritis Pada Pemberitaan Kenaikan Ppn 12% Di Media Online Kompas.Com

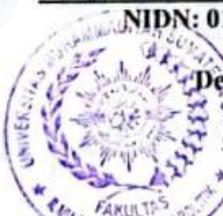
Medan, 14 April 2025

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Rihut Priadi, S. Sos., M.I.Kom
NIDN: 0120057303

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi

Akhyar Anshori, S.Sos., M.I.Kom
NIDN: 0127048401

Dekan

Assoc. Prof. Dr. ARIEN SALEH, S.Sos., MSP
NIDN: 0030017402

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, MAULANA ISMAIL, NPM 2103110099, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 14 Mei 2025

Yang Menyatakan,




MAULANA ISMAIL

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, rahmat, serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Analisis Wacana Kritis Pada Pemberitaan Kenaikan PPN 12% di Media Online Kompas.com.** Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Strata (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu berkat doa dan dukungan yang diberikan oleh kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda **Iman Sukoco** dan Ibunda **Eva Anggraini Saswi** yang sangat penulis cintai dan sayangi yang selalu memanjatkan doa yang tak pernah putus untuk kesuksesan anaknya. Serta adik penulis yaitu **Achmad Farhan Assuja** yang telah memberikan semangat, dukungan, dan juga motivasi selama mengerjakan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh Siregar, M.SP selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Akhyar Anshori, S.Sos., M.I.Kom selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Faizal Hamzah Lubis, S.Sos., M.I.Kom selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ribut Priadi, S.Sos., M.I.Kom. selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan nasihat-nasihat yang memotivasi selama masa perkuliahan serta penelitian skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bimbingan dan ilmu selama penulis menjalani perkuliahan.
9. Biro Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu melengkapi berkas-berkas dan juga informasi perkuliahan.

10. Ucapan terima kasih khusus penulis sampaikan kepada Elvira Gladys S., yang telah membantu proses penulisan skripsi, baik dalam hal pencadangan data maupun dukungan yang selama ini diberikan.

11. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas segala kebersamaan, bantuan, dan dukungan yang berarti dalam perjalanan akademik ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat menerima masukan, kritikan, dan saran tentunya sangat diterima yang bersifat membangun demi perubahan yang lebih baik lagi dari skripsi ini sehingga berguna dalam penyempurnaan skripsi penulis. Penulis juga berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan bagi penulis khususnya.

Medan, April 2025

Penulis

Maulana Ismail

NPM: 2103110099

**Analisis Wacana Kritis Pada Pemberitaan
Kenaikan PPN 12% di Media Online Kompas.com**

MAULANA ISMAIL

NPM : 2103110099

ABSTRAK

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025 menimbulkan berbagai reaksi di tengah masyarakat. Kompas.com, sebagai media massa berperan untuk membingkai wacana terkait kebijakan kenaikan PPN ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Kompas.com membingkai pemberitaan kenaikan PPN 12% menggunakan pendekatan analisis wacana kritis model *Norman Fairclough*, yang mencakup dimensi linguistik, praktik diskursif, dan praktik sosial. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan data tiga berita Kompas.com edisi Desember 2024. Analisis menunjukkan bahwa pemberitaan lebih menyoroti dampak negatif kenaikan PPN, didukung dengan menampilkan narasumber dari tokoh masyarakat, akademisi, dan pengusaha yang menolak kebijakan ini. Dari segi teks, ditemukan penggunaan diksi membingkai kebijakan PPN sebagai beban bagi masyarakat. Pada praktik diskursif, distribusi berita di platform digital memungkinkan opini publik berkembang melalui komentar. Dari aspek praktik sosial, pemberitaan berfungsi sebagai arena negosiasi kepentingan berbagai pihak. Kesimpulannya, pemberitaan di Kompas.com lebih menonjolkan kritik pada kenaikan PPN 12%, yang dapat mempengaruhi persepsi publik pada kebijakan tersebut. Penelitian ini menegaskan bahwa media tidak hanya menyampaikan informasi, namun juga membentuk opini publik melalui strategi wacana tertentu.

Kata kunci: Analisis Wacana Kritis, PPN 12%, Kompas.com, *Norman Fairclough*, Media Online

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pembatasan Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II URAIAN TEORITIS	10
2.1 Komunikasi	10
2.1.1 Komunikasi Verbal.....	13
2.1.2 Komunikasi Non Verbal.....	13
2.3 Berita	17
2.4 Teori Ekonomi-Politik Media.....	21
2.5 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	22
2.6 Wacana Kritis	23
2.6.1 Tindakan.....	25
2.6.2 Konteks.....	25
2.6.3 Histori.....	25
2.6.4 Kekuasaan	26
2.6.5 Ideologi.....	26
2.7 Analisis Wacana Kritis Model <i>Norman Fairclough</i>	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Kerangka Konsep	28
3.3 Definisi Konsep.....	29
3.3.1 Teks	29
3.3.2 Praktik Diskursif.....	29

3.3.3	Praktik Sosial.....	29
3.4	Kategorisasi Penelitian	29
3.5	Narasumber Penelitian.....	29
3.6	Teknik Pengumpulan Data	29
3.6.1	Observasi	30
3.6.2	Dokumentasi.....	30
3.6.3	Studi Literatur.....	30
3.7	Teknik Analisis Data.....	30
3.7.1	Reduksi Data	31
3.7.2	Penyajian data.....	31
3.7.3	Menarik Kesimpulan	31
3.8	Waktu dan Lokasi Penelitian	31
3.9	Deskripsi Ringkas Objek Penelitian	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		33
4.1	Hasil Penelitian.....	33
4.1.1	Berita 1: “Mengapa Sebaiknya Pemerintah Membatalkan PPN 12 Persen?”	33
4.1.2	Berita 2 “PPN 12 Persen Dianggap Persulit Akses Pendidikan Berkualitas, Pemerintah Perlu Kaji Ulang”	40
4.1.3	Berita 3 “Pengusaha Protes, Sudah Berkontribusi tetapi Ditekan PPN 12 Persen”.....	46
4.2	Pembahasan	50
4.2.1	Analisis Teks	51
4.2.2	Analisis Praktik Diskursif.....	52
4.2.3	Analisis Praktik Sosial.....	53
BAB V PENUTUP		55
5.1	Simpulan.....	55
5.2	Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA		57
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian	27
Tabel 4.1 Identitas Berita 1.....	31
Tabel 4.2 Analisis Teks Berita 1	34
Tabel 4.3 Analisis Praktik Diskursif Berita 1	36
Tabel 4.4 Analisis Praktik Sosial Berita 1	37
Tabel 4.5 Identitas Berita 2.....	38
Tabel 4.6 Analisis Teks Berita 2	41
Tabel 4.7 Analisis Praktik Diskursif Berita 2	42
Tabel 4.8 Analisis Praktik Sosial Berita 2	43
Tabel 4.9 Identitas Berita 3.....	44
Tabel 4.10 Analisis Teks Berita 3	46
Tabel 4.11 Analisis Dimensi Praktik Diskursif Berita 3.....	47
Tabel 4.12 Analisis Praktik Sosial Berita 3	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	28
----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya waktu, aktivitas perdagangan global terus berkembang, membuat negara-negara saling bergantung satu sama lain demi memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Indonesia dengan wilayah kepulauannya yang sangat luas, sangat mengandalkan perdagangan untuk membangun infrastruktur daerah dan nasional. Era perdagangan bebas telah memperluas perdagangan yang awalnya hanya antar wilayah menjadi antar negara (Tjendana & Sulfitri, 2025). Sebagai negara dengan perekonomian yang sedang berkembang, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan kebutuhan fiskal dan stabilitas ekonomi masyarakat.

Peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat pendapatan negara di tengah tekanan kebutuhan pembiayaan guna mendukung pembangunan infrastruktur dan program-program pemerintah lainnya, terutama pasca COVID-19 yang masih meninggalkan dampak mendalam pada struktur ekonomi nasional. Kenaikan harga barang dan jasa merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat Indonesia, terutama kelompok menengah ke bawah, oleh karena itu, rencana kebijakan pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini diwarnai dengan pro dan kontra di tengah masyarakat karena dampaknya yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, inflasi, serta pertumbuhan ekonomi

nasional, khususnya di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah yang akan merasakan dampak kenaikan harga barang dan jasa.

Pemberitaan mengenai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% merupakan isu yang tengah menjadi sorotan publik. Dalam konteks perekonomian saat ini, kenaikan tarif PPN dianggap sebagai langkah pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara, namun juga menimbulkan berbagai reaksi dari golongan masyarakat. Keputusan ini dipandang penting mengingat kebutuhan untuk menjaga stabilitas fiskal negara dalam situasi ekonomi yang dinamis dan penuh tantangan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, peningkatan PPN memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan negara secara signifikan, namun disisi lain dapat mempengaruhi daya beli masyarakat yang masih dalam pemulihan pasca pandemi.

Dari beberapa artikel Kompas.com pada tanggal tertentu, menyatakan bahwa pemberitaan mengenai kebijakan fiskal ini kerap kali diwarnai dengan berbagai perspektif, baik positif maupun negatif. Dalam pemberitaan tersebut, berbagai ahli ekonomi memberikan pandangan yang berbeda terkait dampak jangka panjang dari kebijakan ini. Dengan demikian, Pemberitaan tentang kenaikan PPN 12% ini menjadi isu krusial yang melibatkan berbagai pihak dan perspektif, serta menyoroti dinamika antara kepentingan fiskal pemerintah dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pada berita Kompas edisi 28 Desember 2024 yang berjudul “PPN Naik Jadi 12%, Daya Beli Masyarakat Makin Melemah” menurut seorang tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid keputusan

pemerintah untuk menaikkan PPN menjadi 12% akan semakin melemahkan daya beli masyarakat (Safitri, 2024).

Pajak merupakan pungutan wajib yang menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Terdapat berbagai macam jenis pajak yang berbeda dengan berbagai macam tarif yang ketentuannya sudah diatur oleh pemerintah. Salah satu pajak yang telah ditetapkan pemerintah adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan bagian dari pajak konsumsi yang dikenakan pada barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Beberapa tahun terakhir Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami kenaikan tarif.

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan keputusan fiskal yang memiliki dampak pada perekonomian negara. Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Tarif PPN berubah dari 10% menjadi 11% per 1 April 2022. Kenaikan tersebut diharapkan dapat menambah penerimaan negara, namun kenaikan tersebut juga menyebabkan beberapa perubahan pada perekonomian negara (Nugraini & Fauzan, 2024).

Beberapa tahun ini, inflasi mengalami lonjakan, terutama pada tahun 2023. Harga barang dan jasa melonjak setelah adanya pandemi Covid-19 dan perang antara Rusia dan Ukraina. Dilansir dari BBC dalam artikel berjudul *Deflasi lima bulan berturut-turut “masyarakat kelas pekerja sudah tidak uang lagi untuk berbelanja”* Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasi 0,12% pada September 2024 sehingga daya beli masyarakat diproyeksikan melemah. Terlebih pemberlakuan tarif baru PPN dilakukan di tengah kenaikan harga komoditas dan bahan pokok (Nugraini & Fauzan, 2024)

Di era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi, media massa memegang fungsi krusial dalam proses penyebaran informasi kepada publik. Masyarakat menunjukkan kecenderungan untuk memperoleh berita melalui kanal daring. Berdasarkan penelitian Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2019, dari total 264 juta penduduk Indonesia, sebanyak 171,7 juta jiwa (64,8 %) telah terhubung dengan internet. (Kiki Astria et al., 2021).

Pesatnya kemajuan teknologi menuntut masyarakat untuk terus menyesuaikan diri dengan tatanan kehidupan baru. Keberadaan teknologi tersebut juga telah memengaruhi pola konsumsi informasi, di mana masyarakat yang semula mengandalkan format analog kini beralih ke format digital.

Internet merupakan salah satu manifestasi kemajuan teknologi. Berdasarkan laporan pada artikel yang berjudul “Digital 2021”, pada awal tahun 2021 tercatat 202,6 juta pengguna internet, setara dengan 73 % dari total populasi nasional. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 15,5 % dibandingkan periode sebelumnya, dengan tambahan 27 juta pengguna baru internet di Indonesia pada tahun 2021. Dalam aktivitas daringnya, masyarakat Indonesia cenderung memanfaatkan internet untuk mengakses media sosial sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hiburan dan informasi (Hadi & Suratnoaji, 2023).

Media pemberitaan, baik itu media massa konvensional maupun media digital, telah memainkan peran penting dalam mempengaruhi opini publik. Pemberitaan mengenai kebijakan kenaikan pajak dapat memberikan berbagai sudut pandang dari masyarakat baik mendukung maupun menentang. Informasi yang diberikan oleh

media pemberitaan saat ini sering kali menjadi dasar masyarakat dalam bentuk pendapat mereka mengenai kebijakan tersebut. Pemberitaan yang bersifat sensasional atau provokatif dapat memperburuk polarisasi opini, sementara pemberitaan yang lebih objektif dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai alasan dibalik kebijakan tersebut (Idah Nufajriya Awwalin, 2024).

Respons publik terhadap kebijakan kenaikan pajak sangat bergantung pada cara kebijakan tersebut di informasikan atau disampaikan oleh pemerintah serta bagaimana media massa berperan dalam bentuk pandangan masyarakat. Dalam konteks ini, peran media menjadi sangat strategis. Kompas.com sebagai salah satu media online terbesar di Indonesia memiliki pengaruh signifikan dalam membingkai isu-isu kebijakan publik, termasuk kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Melalui penyajian berita, Kompas.com dapat mempengaruhi pemahaman, sikap, bahkan reaksi masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana media ini menyajikan wacana terkait kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), apakah bersifat mendukung, kritis, atau netral.

Dalam memahami bagaimana media menyajikan wacana terkait kebijakan ini, analisis wacana kritis diperlukan. Pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) oleh *Norman Fairclough* sangat relevan digunakan dalam konteks ini. Pendekatan ini memandang bahwa teks berita tidak hanya merupakan rangkaian kata-kata, tetapi juga produk sosial yang memuat ideologi tertentu dan berhubungan erat dengan

kekuasaan. Model Normal *Fairclough* memiliki tiga skema dimensi yaitu struktur teks, *Discourse Practice*, dan *Sociocultural Practice* (Putri, 2018).

Kompas.com merupakan salah satu portal berita daring terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia Group, sebuah perusahaan media terbesar di Indonesia. Portal ini diluncurkan pada tahun 1995 sebagai platform untuk memperluas jangkauan berita yang sebelumnya hanya diterbitkan melalui media cetak Harian Kompas. Kini, Kompas.com telah berkembang menjadi sumber informasi yang kredibel dan populer di kalangan masyarakat Indonesia. Kompas bertujuan untuk menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan independen bagi pembacanya.

Dengan moto “Amanat Hati Nurani Rakyat”, portal ini berkomitmen untuk menjadi media yang dapat dipercaya dalam menyuarakan isu-isu penting di berbagai bidang. Sebagai bagian dari Kompas Gramedia Group, Kompas.com memiliki reputasi yang baik di dunia jurnalistik. Portal ini dikenal dengan pemberitaan faktual, mendalam, netral, baik untuk isu-isu nasional maupun internasional. Kompas.com telah memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau pembaca secara luas. Dengan tampilan yang responsif di perangkat seluler dan fitur interaktif seperti video, infografik, dan siaran langsung, portal ini menjadi salah satu platform utama bagi masyarakat Indonesia. Sebagai salah satu situs berita yang paling sering diakses di Indonesia, Kompas.com memiliki pembaca dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, profesional, hingga pengambil kebijakan. Dengan pembaca yang beragam, pemberitaan di

Kompas.com sering kali menjadi acuan untuk diskusi publik dan pembentukan opini masyarakat.

1.2 Pembatasan Masalah

Dengan dibuatnya penelitian ini, maka adapun pembatasan masalah yang diteliti dibatasi dari pemberitaan media online Kompas.com pada 18 Desember 2024 sampai 29 Desember 2024 dan peneliti hanya akan berfokus pada teks berita yang diproduksi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, rumusan masalah yang akan diteliti adalah “Bagaimana media membentuk wacana terkait kenaikan PPN 12% melalui analisis wacana kritis model *Norman Fairclough* pada pemberitaan di media online Kompas.com?”

1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah diuraikan, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui Analisis Wacana Kritis model *Norman Fairclough* pada pemberitaan kenaikan PPN 12% di media online Kompas.com.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam kajian analisis wacana kritis. Pendekatan *Norman Fairclough* yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjadi acuan untuk menganalisis pemberitaan media, khususnya terkait isu-isu kebijakan

ekonomi dan publik. Penelitian ini juga dapat memperbanyak literatur mengenai peran media online dalam membentuk wacana publik di Indonesia.

1.5.2 Manfaat Praktis

Bagi Media Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada media khususnya Kompas.com, mengenai bagaimana pemberitaan mereka dapat mempengaruhi persepsi publik dan pembentukan opini terkait kebijakan ekonomi.

Media diharapkan dapat lebih bijak dalam membingkai isu-isu sensitif agar pemberitaan bersifat informatif, adil, dan netral. Lalu bagi Pembuat Kebijakan hasil penelitian ini dapat menjadi refleksi untuk memahami pentingnya strategi komunikasi publik dalam menyampaikan kebijakan ekonomi, sehingga dapat meminimalkan kesalahpahaman atau resistensi dari masyarakat.

Yang terakhir ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih kritis dalam menerima dan mengonsumsi informasi dari media, terutama yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.

1.5.3 Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang analisis wacana kritis, hubungan antara media, ideologi, dan kebijakan publik. Dengan pendekatan studi pustaka, penelitian ini juga dapat menjadi contoh penerapan metode kualitatif dalam analisis media.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini berisi tentang teori yang relevan dengan rumusan masalah yang memudahkan penulis untuk mengkaji judul yang telah ditetapkan

BAB III : Dalam bab ini menguraikan jenis penelitian, kerangka konsep, kategorisasi penelitian, narasumber penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, waktu dan lokasi penelitian

BAB IV : Dalam bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan

BAB V : Dalam bab ini berisi simpulan dari pembahasan dan saran untuk hasil penelitian

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Komunikasi

Dalam evolusinya, konsep komunikasi menerima beragam definisi, yang dipengaruhi oleh kontribusi berbagai disiplin ilmu, mulai dari sosiologi, antropologi, dan ilmu politik hingga psikologi. Komunikasi merupakan kegiatan fundamental bagi manusia, yang esensinya tidak terbatas pada ranah organisasi semata, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia (Damayani Pohan & Fitria, 2021).

Menurut Hovland dalam Effendy, secara teoritis, ilmu komunikasi merupakan usaha sistematis dalam merumuskan prinsip-prinsip informasi secara eksplisit serta membentuk pendapatan dan sikap. Sementara itu Hafied Cangara mengemukakan dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Komunikasi* menukil pernyataan Rogers dan Kincaid, komunikasi merupakan proses transfer gagasan dari sumber kepada satu atau lebih penerima dengan tujuan memodifikasi perilaku. Dalam perkembangan definisi tersebut, komunikasi dapat dimaknai sebagai ilmu yang menyampaikan pesan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam hal ini komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan, lebih dari itu, pesan yang disampaikan antara individu satu dengan yang lainnya juga memiliki *feedback* (Gerin Rio Pranata, 2022)

Istilah komunikasi dalam bahasa inggris "*Communication*", dari bahasa latin "communicatus" yang memiliki arti berbagai atau menjadi milik bersama, komunikasi diartikan sebagai proses sharing antara pihak-pihak yang melakukan

aktivitas komunikasi tersebut. Sebagai disiplin ilmu sosial yang bersifat multidisipliner, ilmu komunikasi tak terlepas dari beragam perspektif para ahli yang menekuni kajiannya, sehingga definisi serta konsep komunikasi menjadi semakin beragam. Masing-masing pandangan memberikan penekanan berbeda terhadap makna, ruang lingkup, dan konteks, namun secara fundamental bersifat saling melengkapi dan memperkaya pemahaman tentang komunikasi sejalan dengan perkembangan dalam ilmu komunikasi.

Menurut Hovland, Jains dan Kelley, komunikasi merupakan suatu proses di mana seorang komunikator menyampaikan stimulus, yang umumnya berbentuk ujaran, dengan tujuan memengaruhi atau membentuk perilaku audiens. Proses ini melibatkan penyaluran informasi, gagasan, emosi, dan keterampilan melalui simbol-simbol seperti kata, gambar, angka, dan sebagainya.

Menurut Thariq & Anshori (2017) komunikasi adalah proses pertukaran makna yang melibatkan dua individu atau lebih. Menurut Wibowo, komunikasi merupakan aktivitas penyampaian pikiran, konsep, dan keinginan kepada pihak lain, atau dapat dipandang sebagai seni memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sementara itu, Astrid menyatakan bahwa komunikasi adalah kegiatan transfer simbolik yang memuat makna dan harus dipahami secara bersama oleh para pelaku dalam interaksi komunikatif.

Diungkapkan oleh Shannon & Weaver dalam (Zulfahmi, 2017) bahwa komunikasi merupakan interaksi antarindividu yang saling memengaruhi, baik secara sengaja maupun tidak, tidak terbatas pada bentuk verbal, melainkan juga

mencakup ekspresi wajah, representasi visual, karya seni, dan penggunaan teknologi.

Berbagai definisi tersebut bersifat saling melengkapi. Pada umumnya, komunikasi dimaknai sebagai sebagai proses merumuskan, menyampaikan, menerima, dan mengolah pesan yang terjadi baik di dalam diri individu maupun antara dua pihak atau lebih dengan maksud dan tujuan tertentu. Definisi ini menekankan empat unsur pokok, yakni pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan.

Dalam setiap proses komunikasi, pelaku melaksanakan empat tahap: pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan. Tahapan ini umumnya berlangsung secara berurutan. Pembentukan pesan merujuk pada penciptaan ide atau gagasan yang terjadi dalam benak individu melalui aktivitas sistem saraf. Kemudian, pesan yang telah dirumuskan disampaikan kepada penerima melalui saluran langsung maupun tidak langsung. Setelah tahap perumusan dan pengiriman pesan, individu akan menerima pesan yang berasal dari pihak lain. Pesan yang diterima selanjutnya diproses oleh sistem saraf dan ditafsirkan. Dalam proses interpretasi ini, pesan tersebut berpotensi menimbulkan tanggapan atau reaksi dari individu. Apabila hal tersebut terjadi, maka individu akan kembali membentuk serta menyampaikan pesan baru. Keempat tahapan tersebut berlangsung secara berulang (Damayani Pohan & Fitria, 2021)

Menurut Zaenal Mukarom (2020) dalam bukunya yang berjudul *Teori-teori Komunikasi*, secara umum, jenis komunikasi dibagi ke dalam 2, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non verbal.

2.1.1 Komunikasi Verbal

Verbal communication adalah bentuk komunikasi yang disampaikan melalui media tulisan atau lisan, seperti berinteraksi langsung, menelepon, mempresentasikan makalah, membacakan puisi, membaca koran, mendengarkan radio, dan menonton televisi. Meskipun efektivitasnya menurut Ross hanya mencapai sekitar 35% dibandingkan komunikasi nonverbal, komunikasi verbal tetap diperlukan karena terdapat keadaan di mana pesan tidak dapat disampaikan secara nonverbal. Melalui komunikasi ini, diharapkan penerima pesan dapat memahami informasi yang disampaikan komunikator secara akurat, baik melalui membaca maupun mendengarkan.

2.1.2 Komunikasi Verbal

Komunikasi nonverbal merupakan bentuk komunikasi yang cenderung kurang terstruktur, sehingga menjadikan proses pembelajarannya lebih menantang. Perbedaan wilayah geografis, tingkat pendidikan, dan konteks sosial yang beragam menghasilkan variasi latar belakang, sehingga interpretasi terhadap pesan nonverbal dapat berbeda dan menjadikan pemahaman komunikasi nonverbal tetap sebagai aspek yang wajib dipelajari. Komunikasi nonverbal memiliki urgensi sebagai berikut:

- a. Penyampaian pesan yang didasarkan akan perasaan dan emosi akan sangat kelihatan alami
- b. Dengan memperhatikan isyarat non verbal seseorang dapat mendeteksi atau menegaskan kejujuran pembicara
- c. Bersifat efisien

Macam-macam komunikasi non verbal:

- 1) Isyarat
- 2) Simbol
- 3) Warna
- 4) Gesture
- 5) Mimik muka
- 6) Intonasi suara, dan sebagainya

Sementara tujuan komunikasi non verbal adalah:

- 1) Memberikan informasi
- 2) Mengatur alur percakapan
- 3) Ekspresi emosi
- 4) Memberikan sifat, melengkapi pesan-pesan verbal
- 5) Mempengaruhi orang lain
- 6) Mempermudah tugas-tugas khusus

Komunikasi yang efektif dan efisien tidak selalu mudah diwujudkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah gangguan dalam proses penyampaian pesan. Bonaria Purba dalam bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar, Gangguan komunikasi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan sifatnya: (a) gangguan mekanis (mechanical noise atau channel noise), yaitu hambatan yang timbul dari saluran komunikasi atau kebisingan fisik, misalnya teks yang tidak terbaca jelas, huruf terbalik, halaman koran sobek, atau keributan hadirin saat rapat; dan (b) gangguan semantik (semantic noise), yaitu distorsi makna

pesan komunikasi, di mana pemahaman kata menjadi keliru; semantik sendiri merujuk pada ilmu tentang makna kata atau pergeseran arti kata tersebut

Setiap individu memungkinkan memiliki interpretasi yang beragam terhadap suatu simbol kata yang sama, disebabkan oleh dua jenis makna, yaitu: makna denotatif (*denotative meaning*), yakni pengertian suatu kata yang secara umum diterima dalam konteks masyarakat dengan bahasa dan budaya yang seragam; dan makna konotatif, yaitu pengertian yang bersifat emosional yang berasal dari pengalaman serta latar belakang individu (Purba & Gasperz, 2020)

2.2 Media Online

Kemajuan teknologi dewasa ini telah menghasilkan beragam produk daring seperti televisi, surat kabar, dan radio berbasis online. Keberadaan teknologi internet mempermudah akses terhadap berbagai situs yang tersedia. Saat ini, siapa pun dan di mana pun dapat menonton televisi, mendengarkan radio, atau membaca surat kabar secara daring (Suprobo et al., 2016).

Media daring merupakan bentuk media massa yang dapat diakses melalui jaringan internet. Sebagai bagian dari media massa, media daring menerapkan prinsip-prinsip jurnalistik dalam sistem kerjanya. Secara umum, media daring mencakup berbagai platform seperti surat elektronik (email) termasuk milis, situs web (website) termasuk portal berita (media siber), blog, serta berbagai media sosial seperti WhatsApp, Line, Facebook, Twitter (X), Instagram, dan platform digital lainnya. Dalam pengertian yang lebih spesifik, media daring merupakan bentuk media baru (*new media*) yang muncul setelah hadirnya media cetak (seperti

koran, majalah, dan tabloid) serta media elektronik (seperti radio, televisi, dan film). Dalam konteks ini, media daring juga dikenal dengan istilah media siber.

Menurut Kustiawan et al. (2022) media daring memiliki karakteristik khusus serta keunggulan tersendiri apabila dibandingkan dengan media konvensional, sebagaimana diuraikan berikut ini:

- a. Halaman web memiliki kapasitas yang luas sehingga mampu memuat teks dalam jumlah yang sangat panjang.
- b. Proses pemuatan serta penyuntingan naskah dapat dilakukan kapan saja dan dari lokasi mana pun.
- c. Waktu penerbitan bersifat fleksibel dan dapat dilakukan setiap saat.
- d. Penyajian informasi berlangsung cepat, karena begitu diunggah, konten dapat langsung diakses oleh seluruh pengguna.
- e. Cakupan jangkauan meluas secara global bagi siapa pun yang memiliki akses ke internet.
- f. Bersifat aktual, karena memungkinkan penyampaian informasi secara cepat dan mudah.
- g. Informasi dapat diperbarui secara terus-menerus dan kapan pun diperlukan.
- h. Bersifat interaktif, dua arah, serta “egaliter” melalui adanya fitur seperti kolom komentar, ruang percakapan (chat room), jajak pendapat (polling), dan sebagainya.
- i. Konten terdokumentasi secara digital dalam bentuk arsip “bank data”, dan dapat diakses kembali melalui “link”, artikel terkait, maupun fungsi “cari”.

- j. Terkoneksi dengan berbagai sumber eksternal melalui hyperlink yang relevan dengan informasi yang disajikan.

Melalui media daring, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak lain yang terhubung melalui jaringan internet. Keberadaan media daring memungkinkan masyarakat untuk mengakses berita secara mudah tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Pembacaan surat kabar kini dapat dilakukan secara praktis melalui laman web, situs berita daring, buku elektronik (e-book), dan platform digital lainnya. Keuntungan dalam mengakses informasi atau berita melalui media daring antara lain adalah efisiensi waktu, penghematan biaya, serta kemudahan dalam membagikan informasi tersebut secara gratis kepada khalayak luas. Keberadaan media daring memberikan alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh berita secara online (Insani & Zamzamy, 2023)

2.3 Berita

Berita merupakan merupakan elemen yang melekat secara integral dalam kehidupan manusia, banyak pihak mendefinisikan berita atau news berdasarkan arah mata angin, yang kemudian disimpulkan bahwa di mana pun seseorang berada, akan selalu terdapat suatu peristiwa. Berita adalah bentuk penyajian informasi yang disampaikan kepada khalayak luas. Informasi tersebut disalurkan melalui media massa, baik elektronik maupun cetak, dengan ragam isi yang disajikan kepada publik, mencakup informasi yang bersifat mendidik serta menghibur (Efendy et al., 2023).

Dalam praktiknya, berita adalah suatu bentuk penyajian informasi faktual yang dipublikasikan kepada publik melalui berbagai media massa, baik cetak, elektronik, maupun digital. Kehadiran berita tidak hanya sebagai alat penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, hiburan, hingga pembentukan opini publik. Media massa menyajikan berbagai jenis informasi kepada khalayak dengan gaya penyampaian yang disesuaikan dengan karakteristik audiens masing-masing. Di tengah perkembangan teknologi informasi, berita kini dapat diakses dengan lebih cepat dan luas melalui media online, yang memungkinkan khalayak menerima informasi secara real-time.

Berita yang berkualitas memiliki serangkaian karakteristik atau elemen yang membedakannya dari bentuk komunikasi lainnya. Pertama, berita bersifat faktual, yaitu berdasarkan pada kenyataan atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Informasi yang disampaikan tidak boleh mengandung unsur fiksi atau rekayasa, meskipun peristiwa yang diberitakan telah terjadi di masa lampau, selama isinya masih memiliki nilai berita yang relevan dan penting untuk diketahui khalayak.

Kedua, berita juga harus aktual, artinya mengangkat peristiwa yang baru saja terjadi atau sedang hangat diperbincangkan di tengah masyarakat. Aktualitas menjadi unsur penting karena pembaca cenderung tertarik pada informasi yang baru, segar, dan memiliki nilai kecepatan.

Ketiga, berita harus disajikan dengan cara yang menarik dan unik, agar mampu memikat perhatian pembaca. Pilihan diksi, struktur penyajian, serta sudut pandang penulisan menjadi elemen penting dalam menciptakan ketertarikan. Berita yang menarik biasanya mengandung nilai-nilai yang dekat dengan kehidupan manusia,

seperti kemanusiaan, konflik, emosi, drama, maupun kejadian luar biasa yang tidak terjadi setiap hari.

Keempat, dampak atau pengaruh dari informasi yang disampaikan juga menjadi tolok ukur penting dalam penentuan nilai berita. Suatu peristiwa akan dianggap layak diberitakan apabila memiliki efek signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, maupun budaya masyarakat. Ketika informasi tersebut menyentuh kepentingan banyak orang, maka nilai beritanya akan meningkat.

Kelima, dalam struktur penyusunannya, berita harus memiliki urutan waktu atau kronologi yang jelas. Informasi mengenai kapan dan di mana suatu peristiwa terjadi wajib dicantumkan, agar pembaca dapat memahami konteks kejadian secara menyeluruh. Penyajian berita secara runtut dan logis membantu audiens dalam mengikuti alur peristiwa yang diberitakan.

Keenam, penyampaian berita harus dilakukan secara objektif, artinya tidak memuat pendapat pribadi penulis atau wartawan. Isi berita harus berangkat dari data dan fakta yang dapat diverifikasi, bukan dari opini atau interpretasi subjektif yang dapat mengarahkan pembaca pada sudut pandang tertentu. Objektivitas ini penting untuk menjaga kredibilitas media serta kepercayaan publik terhadap informasi yang disampaikan.

Ketujuh, bahasa yang digunakan dalam teks berita umumnya bersifat sederhana, baku, dan komunikatif. Artinya, kalimat-kalimat disusun dengan gaya bahasa yang lugas, tidak berbelit, serta sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa yang komunikatif bertujuan agar pesan dalam

berita dapat dipahami dengan mudah oleh khalayak luas dari berbagai latar belakang pendidikan dan sosial.

Selain karakteristik tersebut, berita juga terdiri atas berbagai jenis, tergantung pada pendekatan dan kedalaman informasi yang disajikan. Beberapa klasifikasi umum dalam dunia jurnalistik antara lain:

2.3.1 Straight News

Berita langsung yang ditulis secara singkat, lugas, dan apa adanya. Jenis ini biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi penting dan terkini tanpa penambahan analisis atau interpretasi. Banyak digunakan di bagian utama media seperti headline atau berita kilat.

2.3.2 Depth News

Jenis berita yang dikembangkan lebih dalam dengan memberikan konteks dan latar belakang dari suatu peristiwa. Tujuannya adalah agar pembaca tidak hanya mengetahui apa yang terjadi, tetapi juga memahami mengapa peristiwa itu penting.

2.3.3 Investigative News

Berita yang disusun berdasarkan proses investigasi yang panjang dan mendalam, dengan melibatkan berbagai sumber dan dokumen pendukung. Tujuannya adalah untuk mengungkap fakta yang tidak terlihat di permukaan, biasanya menyangkut isu-isu yang kontroversial atau sensitif.

2.3.4 Interpretative News

Berita yang tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga memberikan penjelasan dan interpretasi dari wawancara tentang makna atau dampak dari

peristiwa yang diberitakan. Meskipun terdapat interpretasi, tetap harus berdasarkan pada data yang kuat.

2.3.5 Opinion News

Jenis berita yang menampilkan pendapat atau pandangan dari tokoh masyarakat, ahli, atau pihak tertentu terhadap suatu isu. Meskipun mengandung opini, tetap disajikan dalam format berita dan berdasarkan fakta-fakta pendukung.

2.4 Teori Ekonomi-Politik Media

Teori ekonomi politik media termasuk dalam ranah teori makro. Istilah ini diambil kembali dari konsep klasik untuk merujuk pada pendekatan yang menitikberatkan analisis pada struktur ekonomi ketimbang konten ideologis berita. Teori ini menyatakan bahwa ideologi sangat bergantung pada kekuatan ekonomi dan mengarahkan penelitian empiris pada struktur kepemilikan media serta mekanisme kerja pasar dalam industri media.

Berdasarkan tinjauan tersebut, institusi media sebaiknya dipandang sebagai komponen dalam sistem ekonomi yang terintegrasi dengan sistem politik. Kualitas pengetahuan sosial yang diproduksi oleh media sangat ditentukan oleh mekanisme pertukaran nilai dari berbagai jenis konten dalam rangka perluasan pasar, serta oleh kepentingan ekonomi para pemilik dan pengambil kebijakan (Hidayat & Ruslan, 2018).

Pada dasarnya pendekatan ekonomi-politik media juga dipahami sebagai kerangka teoretis yang berkaitan dengan kapitalisme media. Pendekatan ini menitikberatkan analisis pada struktur ekonomi dibandingkan muatan ideologis media.

Teori ini menekankan hubungan ketergantungan ideologi terhadap kekuatan ekonomi dan memfokuskan penelitian pada analisis empiris mengenai struktur kepemilikan serta mekanisme operasional media. Dalam tinjauan Hidayat & Ruslan (2018), lembaga media hendaknya dipandang sebagai komponen integral dari sistem ekonomi yang terjalin erat dengan sistem politik. Kualitas pengetahuan sosial yang dihasilkan media bagi publik sangat dipengaruhi oleh nilai tukar konten yang beragam dalam konteks ekspansi pasar, sekaligus oleh kepentingan ekonomi pemilik dan pembuat kebijakan.

2.5 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap kenaikan nilai barang atau jasa selama proses produksi dan distribusi. PPN termasuk dalam kategori pajak konsumsi yang dibayar oleh konsumen akhir, namun dipungut dan disetorkan oleh pelaku usaha yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berbagai barang dan jasa dikenakan PPN, sementara barang-barang tertentu dibebaskan dari PPN, seperti hasil tambang atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, kebutuhan pokok yang sangat penting bagi masyarakat, serta makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan tempat sejenis, baik yang dikonsumsi di tempat maupun dibawa pulang, termasuk yang disediakan oleh jasa catering atau boga. Selain itu, mata uang, emas batangan, dan surat berharga juga tidak dikenakan PPN.

Penentuan besaran tarif Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Berikut ini daftar tarif dari PPN:

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai 0% berlaku untuk ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan ekspor Jasa Kena Pajak.
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai 11% berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri, termasuk di daerah Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur tentang kepabeanan.
- c. Tarif PPN atas barang mewah ditetapkan paling rendah 11% dan paling tinggi 200%.
- d. Khusus untuk barang dan jasa yang terkena tarif Pajak Pertambahan Nilai 11%, besaran tarif tersebut masih dapat diubah menjadi paling rendah 5% hingga paling tinggi 20% mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang dibebankan kepada pembeli tercantum secara eksplisit pada setiap bukti transaksi jual beli. Dengan demikian, harga yang harus dibayar akan meningkat sesuai besaran PPN. Namun, apabila keterangan PPN tidak tercantum pada struk, hal tersebut menunjukkan bahwa total harga yang tertera sudah mencakup PPN. (Maulida, 2024).

2.6 Wacana Kritis

Analisis wacana kritis (AWK) adalah suatu pendekatan metodologis yang menegaskan bahwa media tidak bersifat independen atau netral. Sebaliknya, media dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu dan digunakan untuk menguasai kelompok lain yang berada dalam posisi yang lebih lemah (Rengganis dkk., 2019).

Awal perkembangan Analisis wacana kritis dikemukakan oleh *Van Dijk* (1985) dengan menunjukkan dua kecenderungan. Kecenderungan pertama

mengindikasikan bahwa analisis struktural terhadap teks maupun percakapan berkembang menjadi kajian yang bersifat abstrak, yang terlepas dari konteks penggunaan bahasa yang sesungguhnya, berbeda dengan pendekatan fungsi kalimat yang telah dibahas sebelumnya. Dalam perspektif kritis, ciri-ciri wacana dipandang sebagai manifestasi “gejala” dari persoalan yang lebih besar, seperti seksisme, penghilangan diferensiasi kelas, relasi kuasa, serta dominasi subjek, daripada sekadar dianggap sebagai struktur teks semata.

Menurut *Fairclough* dan *Wodak* dalam (Putri, 2018), analisis wacana kritis memandang wacana, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, sebagai suatu praktik sosial. Pendekatan ini merepresentasikan wacana sebagai suatu praktik sosial yang membentuk relasi dialektis antara peristiwa diskursif tertentu dengan kondisi, pemahaman, serta struktur sosial yang melatarbelakanginya. Secara mendasar, AWK tidak memahami wacana semata-mata sebagai objek studi linguistik, melainkan menggunakan bahasa untuk menganalisis teks dalam konteks sosial dan ideologis. Bahasa diperlakukan bukan dalam kerangka linguistik tradisional, melainkan sebagai instrumen yang dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu, termasuk reproduksi ideologi.

Analisis wacana kritis menempatkan bahasa sebagai faktor penting dalam mengungkap ketimpangan kekuasaan di masyarakat. Berikut ini disajikan ciri-ciri utama dari analisis wacana kritis yang diambil dari tulisan *Van Dijk*, *Fairclough*, dan *Wodak*

2.6.1 Tindakan

Prinsip pertama menyatakan bahwa wacana dipahami sebagai suatu tindakan, bukan sebagai entitas yang terisolasi dalam ruang tertutup. Pemahaman ini memiliki beberapa implikasi. Pertama, wacana bersifat purposif yang dapat berfungsi untuk mempengaruhi, membujuk, menolak, dan lainnya karena penulis memiliki niat tertentu, baik yang berskala besar maupun kecil. Kedua, wacana dipandang sebagai fenomena yang dapat dikendalikan dan diekspresikan secara sadar serta terkontrol, bukan sebagai sesuatu yang berlangsung di luar kesadaran atau kendali.

2.6.2 Konteks

Pendekatan analisis wacana kritis mengkaji konteks wacana, meliputi latar, situasi, peristiwa, dan kondisi di mana wacana tersebut diproduksi, dianalisis, dan dipahami. Selain itu, AWK menelaah konteks komunikasi, yakni siapa komunikator dan komunikan beserta motifnya; jenis khalayak dan situasi interaksi; saluran media yang digunakan; variasi bentuk dan perkembangan komunikasi; serta relasi yang terjalin antara para pihak

2.6.3 Histori

Menempatkan wacana dalam kerangka sosial tertentu berarti bahwa wacana diproduksi dan dipahami hanya dalam konteks tersebut, dan tidak dapat diinterpretasikan secara utuh tanpa memperhitungkan konteks pendukungnya. Salah satu aspek krusial untuk memahami suatu teks adalah menelusuri konteks historisnya. Misalnya, dalam analisis wacana selebaran mahasiswa penentang Suharto, pemahaman terhadap teks tersebut hanya dapat dicapai dengan

menghadirkan konteks sejarah saat pembuatan, seperti kondisi politik dan suasana sosial pada masa itu. Proses analisis menuntut pemahaman mengapa wacana tersebut muncul atau dikembangkan dengan cara tertentu, mengapa pilihan bahasa demikian, dan aspek terkait lainnya.

2.6.4 Kekuasaan

Dalam analisis wacana kritis, elemen kekuasaan turut dipertimbangkan. Setiap wacana, baik dalam bentuk teks, percakapan, maupun bentuk lain yang tidak dilihat sebagai sesuatu yang alami, wajar, atau netral, melainkan sebagai arena pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan menjadi kunci dalam relasi antarwacana masyarakat. Contohnya, dominasi laki-laki dalam wacana tentang seksisme atau kekuasaan korporasi yang terwujud sebagai dominasi pengusaha kelas atas terhadap bawahan.

2.6.5 Ideologi

Sebuah teks senantiasa terikat pada ideologi dan memiliki potensi untuk mengarahkan pembaca ke suatu pandangan ideologis. Dalam kerangka budaya kritis, ideologi menjadi fokus bersama kesadaran dan hegemoni. Sebagai konsep sentral dalam analisis wacana kritis, ideologi hadir karena teks, percakapan, dan wacana lain merupakan realisasi praktik ideologis atau cerminan suatu ideologi tertentu.

2.7 Analisis Wacana Kritis Model *Norman Fairclough*

Sebagai praktik sosial, wacana memfokuskan analisis pada institusi, organisasi, relasi kelompok, struktur, dan dinamika sosiopolitik dalam ranah wacana, komunikasi, serta interaksi. Oleh karena itu, analisis wacana kritis menjelaskan keterkaitan antara kedua ranah kajian tersebut termasuk

persinggungan lokal dan global serta hubungan antara struktur wacana dan struktur sosial. Keseluruhan elemen ini merupakan bagian integral dari proses semiologi.

Menurut *Fairclough* dalam (Irfan, 2020), analisis wacana kritis harus memperhatikan tiga dimensinya: teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Analisis teks menitikberatkan pada perbendaharaan leksikal yang memuat makna khusus, serta pemilihan istilah dan metafora yang merujuk pada makna atau tindakan tertentu. Selanjutnya, analisis praktik diskursif bertujuan mengkaji kekuatan pernyataan, yaitu sejauh mana pernyataan tersebut mendorong tindakan atau memiliki daya afirmatif; dalam dimensi ini, koherensi teks yang telah memasuki ranah interpretasi menjadi fokus. Ketiga, praktik sosial berupaya menggambarkan aspek aktivitas sosial dalam pelaksanaan praktik, misalnya, profesi seperti dokter atau pelayan toko menggunakan ragam bahasa khusus, begitu pula politisi yang menerapkan kode sosial tertentu. Wacana senantiasa terkait dengan berbagai tingkat konteks: interaksi langsung, institusi atau organisasi yang lebih luas, serta struktur masyarakat.

Seperti ditunjukkan *Fairclough*, dalam membaca interaksi pasangan menikah, dapat dianalisis relasi mitra dalam keluarga sebagai institusi maupun relasi gender dalam masyarakat yang lebih luas.

BAB III

METODE PENELITIAN

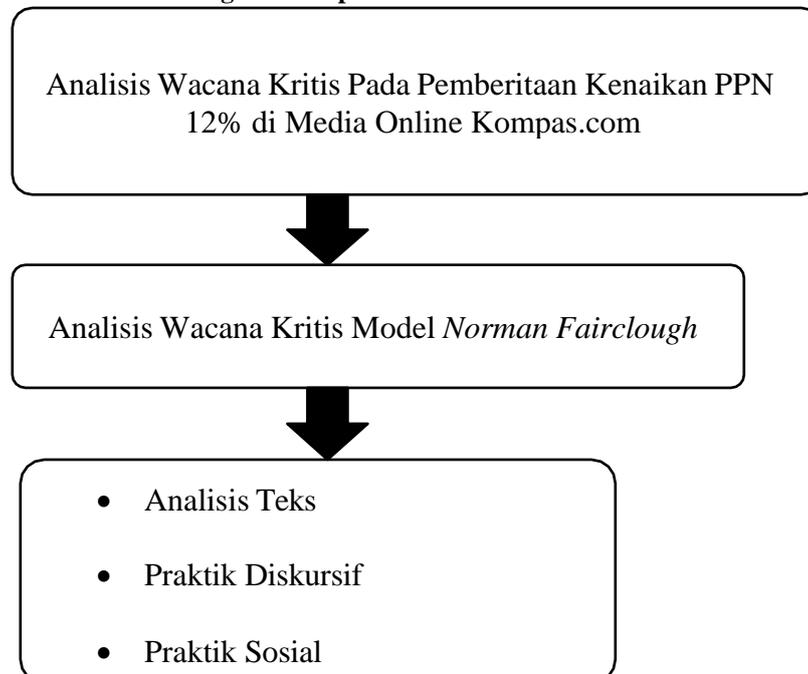
3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif yang memaparkan data dengan sistematis, melihat serta memahami subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta yang muncul secara apa adanya diolah dengan kata-kata secara jelas dan terperinci.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, .Menurut Arifin et al. (2021), penelitian kualitatif bertujuan memberikan penjelasan mendalam terhadap suatu kasus melalui pengumpulan data secara komprehensif.

3.2 Kerangka Konsep

Gambar 3.1 Kerangka Konsep



Sumber: Hasil Penelitian, 2025

3.3 Definisi Konsep

3.3.1 Teks

Menganalisis struktur linguistik seperti tata bahasa, kosakata, dan gaya bahasa.

3.3.2 Praktik Diskursif

Mengkaji proses produksi, distribusi, dan konsumsi teks dalam kerangka sosial.

3.3.3 Praktik Sosial

Menghubungkan wacana dengan struktur sosial yang lebih luas, seperti politik, ekonomi, dan budaya.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian

Konsep Teoritis	Kategorisasi
Analisis Wacana Kritis Model <i>Norman Fairclough</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Teks • Praktik Diskursif • Praktik Sosial

Sumber: Hasil Penelitian, 2025.

3.5 Narasumber Penelitian

Penelitian ini tidak melibatkan narasumber karena fokus analisis berada pada dimensi teks, dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji berita serta dokumentasi yang ada. Semua data yang diperlukan diperoleh langsung dari situs berita online Kompas.com edisi Desember 2024.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

3.6.1 Observasi

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik observasi yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti dengan dokumentasi yang dilihat langsung dari situs berita online Kompas.com edisi Desember 2024.

3.6.2 Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode studi dokumentasi. Dokumen yang dijadikan sumber utama ialah berita dari media daring Kompas.com. Umumnya, studi dokumentasi dimanfaatkan apabila peneliti bermaksud memperoleh informasi terkait suatu peristiwa. Namun, dalam penelitian ini, tidak dilakukan penggalan data melalui pelaku langsung (wartawan), karena sifat penelitian ini adalah analitis. Peneliti hanya akan menelaah dokumen-dokumen yang relevan guna memperoleh data yang diperlukan.

3.6.3 Studi Literatur

Peneliti memperoleh dan menelaah data melalui kajian literatur serta berbagai sumber bacaan, seperti jurnal ilmiah dan buku yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis wacana kritis teori *Norman Fairclough* yang berfokus pada dimensi teks dengan analisis kualitatif. Data kualitatif dapat berupa uraian mendalam dan rinci, kutipan langsung dan

dokumentasi kasus. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa metode atau teknik analisis data kualitatif dapat dilakukan melalui 3 tahap, yaitu:

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan penelitian yang mencakup seleksi, konsentrasi, peringkasan, serta perumusan terhadap data yang telah diperoleh. Dengan demikian, peneliti memfokuskan diri pada bagian-bagian data yang dianggap signifikan dalam penelitian yang dilakukan.

3.7.2 Penyajian data

Penyajian data adalah bagian dari proses mengumpulkan informasi dan kemudian menyusunnya dalam bentuk teks dan naratif, seperti bagan dan catatan. Bentuk-bentuk ini menyatukan informasi dalam suatu format yang terorganisir dan mudah dimengerti.

3.7.3 Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan analisis terhadap data yang sudah dikumpulkan, lalu disusun dalam kolom tabel untuk mengidentifikasi informasi dari wacana pemberitaan kenaikan PPN 12%, dan ditarik kesimpulannya berdasarkan seluruh informasi tersebut.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan. Jadi, peneliti tidak memiliki tempat khusus dalam melakukan penelitian karena dapat dilakukan di mana saja. Penelitian ini akan dilakukan mulai dari Desember 2024 sampai dengan April 2025.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah tiga berita yang diterbitkan oleh Kompas.com pada Desember 2024 terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yaitu, “Mengapa Sebaiknya Pemerintah Membatalkan PPN 12 Persen?”, “PPN 12 Persen Dianggap Persulit Akses Pendidikan Berkualitas, Pemerintah Perlu Kaji Ulang”, dan “Pengusaha Protes, Sudah Berkontribusi tetapi Ditekan PPN 12 Persen”.

Pemilihan Kompas.com sebagai sumber penelitian ini karena Kompas.com merupakan salah satu media online terbesar di Indonesia yang mempunyai jangkauan luas dan kredibilitas tinggi dalam pemberitaan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Berita 1: “Mengapa Sebaiknya Pemerintah Membatalkan PPN 12 Persen?”

Tabel 4.1 Identitas Berita 1

Teks Berita
Sumber: Kompas.com https://nasional.kompas.com/read/2024/12/29/06043721/mengapa-pemerintah-sebaiknya-membatalkan-ppn-12-persen
Waktu Terbit: 29/12/2024, 06:04 WIB
Tim Redaksi: Adhyasta Dirgantara, Ardito Ramadhan
<p>JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang dijadwalkan berlaku pada 1 Januari 2025 masih menuai penolakan dari masyarakat.</p> <p>Awalnya, kenaikan PPN ini dijanjikan hanya dimaksudkan untuk barang-barang mewah, tetapi kenyataannya berdampak pada berbagai barang dan jasa.</p> <p>Sejumlah tokoh dan akademisi memberikan tanggapan terhadap keputusan pemerintah ini. Menurut mereka, pemerintah dapat mencari alternatif lain untuk menambah pendapatan negara ketimbang memungut PPN 12 persen yang dapat membebani rakyat.</p> <p>Apa yang Terjadi jika Pemerintah Tetap Menaikkan PPN?</p> <p>Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Jacklevyn Fritz Manuputty, menyatakan bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen bakal menghantam daya beli masyarakat kecil yang berpenghasilan rendah.</p> <p>"Karena bagaimanapun juga kenaikan PPN akan menghantam daya beli masyarakat kecil yang berpenghasilan rendah," kata Jacky, sapaan akrabnya, Sabtu (28/12/2024).</p> <p>Jacky sangat berharap pemerintah mempertimbangkan penerapan jaring pengaman sosial bagi masyarakat kecil. Ia mengaku mendukung upaya pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi, namun tetap mengingatkan pentingnya aspek keadilan sosial.</p>

Jacky juga menekankan pentingnya transparansi dalam penegakan hukum, khususnya terkait maraknya kasus korupsi.

Dia yakin, pengelolaan pajak yang transparan dan akuntabel akan berbanding lurus dengan kepatuhan masyarakat bayar pajak.

"Kami percaya bahwa kepercayaan masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap pajak akan meningkat seiring pengelolaan pajak dan dana-dana publik lainnya yang dilakukan secara transparan dan akuntabel," ujar Jacky.

Senada dengan Jacky, tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB), Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, menilai bahwa kebijakan ini akan semakin melemahkan daya beli masyarakat.

"Kami menilai kebijakan ini akan semakin menyulitkan masyarakat menengah bawah yang belakangan ini sudah melemah daya belinya," ujarnya dalam acara diskusi virtual.

Apakah Momentum Kenaikan PPN Ini Tepat?

Akademisi yang juga tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB), Komaruddin Hidayat, menilai bahwa pemerintah perlu memikirkan momentum yang tepat untuk menaikkan PPN.

"Momentumnya tolong dipikirkan lagi. Jika kondisinya sudah tepat, silakan saja, tetapi untuk kondisi saat ini, saya khawatir akan kontraproduktif," ungkapnya.

Komaruddin juga menunjukkan bahwa harga barang di pasar mulai melonjak, membuat masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga, semakin tertekan.

"Nah, apakah ada hubungannya dengan akhir tahun atau dengan isu PPN, tapi ibu-ibu rumah tangga sudah langsung menjerit karena harganya sudah naik," ungkap Komarudin.

Ia juga menyoroti struktur kabinet pemerintahan yang menurutnya cukup dengan banyaknya menteri yang bercokol di kabinet. Komarudin mengingatkan agar jangan sampai ada persepsi bahwa PPN dinaikkan demi membiayai para pejabat.

"Jika kemudian image masyarakat sebaliknya bahwa semakin banyak menteri-menteri, semakin banyak gaji, sementara produktifitas belum muncul, lalu PPN dinaikkan, ini seakan-akan rakyat diminta subsidi," kata Komaruddin.

Bisakah Kenaikan PPN Ditunda?

Pemerintah masih memiliki opsi untuk menunda kenaikan PPN menjadi 12 persen, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

"Ya, bisa (ditunda) dengan perppu. Itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang," kata eks Wakil Ketua KPK, Erry Riyana Hardjapamekas.

Namun, ia menambahkan bahwa perppu hanya dapat diterbitkan dalam situasi kegentingan yang memaksa. Erry juga mengingatkan bahwa perppu tersebut mesti disetujui oleh DPR.

Di sisi lain, Lukman Hakim Saifuddin, tokoh Gerakan Nurani Bangsa lainnya, menyatakan bahwa DPR RI juga dapat merevisi undang-undang untuk menunda kenaikan PPN.

Menurut dia, DPR mampu untuk merevisi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur PPN 12 persen bila berkaca dari revisi kilat sejumlah undang-undang yang dibuat DPR.

"Tanpa harus menggunakan perppu, sebenarnya merevisi undang-undang yang ada dalam rangka untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat menengah bawah, saya pikir bisa dilakukan dalam hitungan hari," kata Lukman.

Lukman menekankan pentingnya pemerintah untuk serius memperhatikan dampak dari kenaikan PPN terhadap masyarakat kelas menengah dan bawah.

"Ini perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah," tutupnya

Apa solusi lain untuk meningkatkan pendapatan negara?

Erry berpandangan, ada beberapa alternatif yang bisa ditempuh pemerintah untuk menambah pendapatan negara ketimbang menaikkan PPN 12 persen. Salah satunya adalah menaikkan pajak-pajak yang dipungut dari orang-orang kaya.

"Mengapa tidak dicari sumber-sumber lain, misalnya memajaki orang-orang kaya dengan lebih besar, dan bocoran-bocoran soal ini kan sudah banyak dan sebetulnya pemerintah bisa melakukan ini," ujar Erry.

Erry tetap menghargai bahwa kenaikan PPN merupakan amanat undang-undang. Namun, ia mengusulkan, agar pekerja di sektor pendidikan seperti guru swasta, juga menerima insentif yang diberikan pemerintah.

"Jangan hanya kepada pekerja-pekerja kasar, tapi juga pekerja-pekerja yang tidak kasar seperti guru swasta, dosen, tenaga kependidikan dan sebagainya," katanya.

Apa kata Istana?

Pihak Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi enggan berkomentar ihwal rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen yang terus disorot publik.

Prasetyo menyatakan, pertanyaan soal PPN 12 persen lebih baik ditanyakan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani atau Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Masalah PPN tanya Menkeu, (atau tanya ke Menko Perekonomian) Pak Airlangga,” kata Prasetyo, Sabtu malam.

Ia juga enggan mengomentari terkait dengan aksi demo penolakan kenaikan PPN 12 persen oleh mahasiswa BEM Seluruh Indonesia (SI) di Patung Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024).

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

a. Analisis Teks

Tabel 4.2 Analisis Teks Berita 1

Kutipan	Linguistik	Penjelasan
<p>Judul: “Mengapa Pemerintah Sebaiknya Membatalkan PPN 12%?”</p> <p>Lead: “Kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang dijadwalkan berlaku pada 1 Januari 2025 masih menuai penolakan dari masyarakat.”</p> <p>Isi: “Menurut mereka, pemerintah dapat mencari alternatif lain untuk menambah pendapatan negara ”</p>	Struktur Teks	<p>Penggunaan kata “sebaiknya membatalkan” menunjukkan adanya saran pada pemerintah untuk membatalkan kebijakan PPN 12%, judul berita mengarahkan pandangan pembaca bahwa kebijakan ini perlu ditinjau kembali atau dibatalkan.</p> <p>Artikel ini dimulai dengan menyajikan perspektif bahwa pemerintah dapat mencari cara alternatif lain untuk menambah pendapatan negara daripada menaikkan PPN 12% yang akan membebani masyarakat. Narasi yang dibangun dengan argumen kritis terhadap PPN sebelum memberikan data membuat pembaca cenderung dipengaruhi oleh opini sejak awal membaca.</p>

<p>“Menurut mereka, pemerintah dapat mencari alternatif lain untuk menambah pendapatan negara ketimbang memungut PPN 12 persen yang dapat membebani rakyat.”</p> <p>“Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Jacklevyn Fritz Manuputty, menyatakan bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen bakal menghantam daya beli masyarakat kecil yang berpenghasilan rendah.”</p> <p>“Senada dengan Jacky, tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB), Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, menilai bahwa kebijakan ini akan semakin melemahkan daya beli masyarakat.”</p>	<p>Pemilihan Kata (Diksi)</p>	<p>Istilah “membebani masyarakat”, “menghantam daya beli”, “melemahkan daya beli” digunakan untuk menggambarkan dampak negatif dari kenaikan PPN, penggunaan kata-kata tersebut memberi kesan bahwa kebijakan PPN 12 persen ini memiliki lebih banyak dampak negatif terhadap masyarakat, khususnya dalam hal beban ekonomi.</p>
--	-------------------------------	---

<p>“Menurut mereka, pemerintah dapat mencari alternatif lain untuk menambah pendapatan negara ”</p> <p>“kebijakan ini akan semakin melemahkan daya beli masyarakat.”</p> <p>“kenaikan PPN menjadi 12 persen bakal menghantam daya beli masyarakat kecil yang berpenghasilan rendah.”</p> <p>“Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Jacklevyn Fritz Manuputty”</p> <p>“Senada dengan Jacky, tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB), Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid”</p> <p>“Akademisi yang juga tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB), Komaruddin Hidayat”</p>	<p>Representasi Aktor dalam Teks</p>	<p>Pemerintah digambarkan sebagai pihak yang mempunyai kemampuan untuk mencari alternatif lain guna menambah pendapatan negara daripada memungut PPN 12 persen yang dinilai dapat membebani rakyat.</p> <p>Masyarakat digambarkan sebagai pihak yang akan “terbebani” oleh kenaikan PPN, menunjukkan bahwa masyarakat adalah korban dari kebijakan ini.</p> <p>Berita ini tidak ada mengutip pendapat pakar ekonom, namun memberikan komentar dari para tokoh organisasi dan akademisi yang cenderung kontra dan memandang bahwa kebijakan ini memiliki dampak negatif yang cukup besar untuk masyarakat.</p>
---	--------------------------------------	---

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

b. Praktik Diskursif

Tabel 4.3 Analisis Praktik Diskursif Berita 1

Hal yang diamati	Temuan
Produksi Teks	Artikel ini ditulis oleh Adhyasta Dirgantara dan di edit oleh Ardito Ramadhan, diterbitkan di Kompas.com pada 29 Desember 2024, pukul 06:04 WIB di kota Jakarta.

	<p>Berita ini menggunakan tokoh organisasi sekaligus akademisi sebagai narasumber yang memberikan kritik, sehingga membuat arah pemberitaan ini cenderung kritis terhadap kebijakan PPN</p>
Distribusi dan Konsumsi Teks	<p>Artikel ini dipublikasikan melalui media online, memungkinkan akses luas bagi pembaca, dan menciptakan ruang diskusi lebih luas dibandingkan dengan media cetak.</p> <p>Salah seorang pembaca Kompas.com susilo kristanto berkomentar <i>“kalo blm bisa mensejahterakan rakyatnya jgn memalak rakyat dgn pajak tinggi, contoh Vietnam.”</i></p> <p>Legowo juga memberikan komentar serupa <i>“cobalah pemerintah lebih bijak dgn mencari sumber pendapatan yg lain jangan bisanya pajak melulu yg jadi sasaran. klo sasarannya org kaya raya gpp. Dulu ppn 10% sekarang 11% thn dpn 12% lama2 bisa jadi 20%... pikirkanlah dampak panjangnya gt lho sebab daya beli masyarakat makin hr jg makin lemah.”</i></p> <p>Komentar-komentar tersebut menunjukkan ketidakpuasan publik terhadap kebijakan PPN 12% serta pandangan bahwa pemerintah belum berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat sebelum menaikkan pajak.</p>

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

c. Praktik Sosial

Tabel 4.4 Analisis Praktik Sosial Berita 1

Tingkatan	Level	Temuan
Praktik Sosial	Situasional	Berita ini muncul pada situasi dimana ekonomi negara belum sepenuhnya stabil pasca-pandemi. Masyarakat masih menghadapi tekanan ekonomi akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. Dalam situasi ini, persepsi publik terhadap kebijakan

		pemerintah cenderung negatif, terutama pajak sering kali dianggap lebih membebani rakyat kecil dibandingkan kelompok elite, kepercayaan masyarakat pada pemerintah terkait pengelolaan keuangan negara juga menjadi faktor yang mempengaruhi publik untuk dapat menerima kebijakan ini
	Institusional	Kenaikan PPN mencerminkan strategi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara melalui pajak konsumsi. Namun, kebijakan ini menimbulkan perdebatan mengenai keseimbangan antara kebutuhan pendapatan negara dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Kompas.com sebagai media berperan dalam mengawasi kebijakan publik dengan menyuarakan pendapat dan kekhawatiran masyarakat.

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

4.1.2 Berita 2 “PPN 12 Persen Dianggap Persulit Akses Pendidikan Berkualitas, Pemerintah Perlu Kaji Ulang”

Tabel 4.5 Identitas Berita 2

Teks Berita
Sumber: Kompas.com https://nasional.kompas.com/read/2024/12/18/11313591/ppn-12-persen-dianggap-persulit-akses-pendidikan-berkualitas-pemerintah?page=all
Waktu: 18/12/2024, 11:31 WIB
Tim Redaksi: Tria Sutrisna, Ihsanuddin
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta untuk mengkaji ulang rencana penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen, khususnya yang menyoar sektor jasa pendidikan berstandar internasional ataupun premium. Anggota Fraksi PDI-P DPR RI Novita Hardini menjelaskan, penerapan PPN 12 persen berpotensi menghambat masyarakat untuk mencari alternatif layanan pendidikan berkualitas. “Kita harus berpikir jangka panjang. Jangan sampai kebijakan ini justru membuat pendidikan berkualitas semakin tidak terjangkau dan menghambat peningkatan mutu pendidikan nasional,” ujar Novita dalam keterangannya kepada Kompas.com, Rabu (18/12/2024). Menurut Novita, kebijakan ini dikhawatirkan akan semakin mempersulit masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan berkualitas di dalam negeri. Sebab, tidak semua anak-anak yang mengenyam pendidikan di sekolah

berstandar internasional berasal dari masyarakat kelas atas. Ada pula masyarakat yang memang bekerja keras, demi bisa menyekolahkan anaknya di tempat berkualitas.

"Tidak semua siswa di sekolah internasional berasal dari keluarga kaya. Banyak orang tua yang rela bekerja lebih keras atau menggeser kebutuhan lainnya demi prioritas membiayai pendidikan anak," jelas Novita.

"Jika PPN 12 persen dibebankan kepada sekolah internasional, maka ini menjadi beban yang akan dirasakan langsung oleh para orang tua yang tidak semuanya berasal dari keluarga kaya," sambungnya.

Novita berpandangan, sekolah berstandar internasional seharusnya tetap bisa menjadi alternatif masyarakat, untuk mendorong anak-anaknya memahami struktur dan pola pikir dengan wawasan global.

"Sekolah internasional adalah media kita mampu memahami struktur dan pola pikir dengan wawasan global. Yang pada akhirnya, setiap lulusannya memiliki akses berkarir dan bernetworking ke seluruh penjuru dunia dengan mudah," kata Novita.

Sementara itu, anggota Fraksi PKS DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai penerapan PPN 12 untuk sektor pendidikan semakin menunjukkan inkonsistensi pemerintah.

"Pada dasarnya prinsipnya pendidikan itu adalah nirlaba. Tapi memang di kita ini kadang tidak konsisten ketika bicara soal pendidikan itu nirlaba," ucap Ledia.

"Di bawah yayasan, memang tidak ada pajak yang dibayarkan, padahal ternyata penyelenggaraannya sesungguhnya komersial," sambungnya.

Ledia mengakui belum adanya regulasi yang secara detail soal kategori sekolah internasional yang bersifat nirlaba atau komersial. Namun, pihaknya tak sepakat jika pajak yang dikenakan untuk sekolah internasional mencapai 12 persen. Sebab, pendidikan adalah bagian dari kebutuhan masyarakat.

"Kalau kita lihat sekolah Internasional, memang yang masuk ke sana pasti adalah orang-orang yang mampu namun ketika ditetapkan pajaknya 12 persen, kita keberatan juga ya PPN ini dinaikkan," kata Hanifah.

"Karena itu kan kebutuhan untuk pendidikan, maka kalau pun ada pajak yang harus dibayarkan, harusnya tidak sebesar itu," sambungnya.

Dia pun juga mengingatkan bahwa dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), sekolah yang secara eksplisit dikategorikan sebagai komersial adalah sekolah yang didirikan di kawasan ekonomi khusus.

“Itu yang secara eksplisit disebutkan. Jadi, memang itu yang nanti harus dilihat detailnya, dicermati, apakah sekolah internasional termasuk dalam kategori tersebut,” ungkap Ledia.

Atas dasar itu, kata Ledia, pemerintah perlu mengkaji kembali kebijakan ini dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan pendidikan sekaligus kebutuhan masyarakat.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah resmi menerapkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen mulai 1 Januari 2025 sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Hal ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024).

“Sesuai dengan amanat UU HPP, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari,” ujar Airlangga, dikutip dari siaran langsung akun YouTube Perekonomian RI, Senin.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah akan menerapkan kenaikan tarif PPN 12 persen khusus untuk barang dan jasa mewah.

Menurutnya, barang dan jasa mewah ini dikonsumsi oleh penduduk terkaya dengan pengeluaran menengah ke atas yang masuk dalam kategori desil 9-10.

"Kita akan menyisir untuk kelompok harga barang dan jasa yang masuk kategori barang dan jasa premium tersebut," terangnya dalam konferensi pers, Senin.

Barang dan jasa mewah yang akan dikenai PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025 adalah:

- Rumah Sakit kelas VIP atau pelayanan kesehatan premium lainnya
- Pendidikan standar internasional berbayar mahal atau pelayanan pendidikan premium lainnya
- Listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3600-6600 VA
- Beras premium Buah-buahan premium
- Ikan premium, seperti salmon dan tuna
- Udang dan crustasea premium, seperti king crab
- Daging premium, seperti wagyu atau kobe yang harganya jutaan

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

a. Analisis Teks

Tabel 4.6 Analisis Teks Berita 2

Kutipan	Linguistik	Penjelasan
<p>Judul: “PPN 12 Persen Dianggap Persulit Akses Pendidikan Berkualitas, Pemerintah Perlu Kaji Ulang”</p> <p>Lead: “Pemerintah diminta untuk mengkaji ulang rencana penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen, khususnya yang menysasar sektor jasa pendidikan berstandar internasional ataupun premium”</p> <p>Isi: “Anggota Fraksi PDI-P DPR RI Novita Hardini menjelaskan, penerapan PPN 12 Persen berpotensi menghambat masyarakat untuk mencari alternatif layanan pendidikan berkualitas.”</p>	Struktur Teks	<p>Judul berita ini mengandung framing negatif pada kebijakan pemerintah. Penggunaan kata “persulit akses” memberikan pandangan bahwa kebijakan PPN 12% akan berdampak negatif terhadap masyarakat dalam memperoleh pendidikan berkualitas. Kalimat “pemerintah perlu kaji ulang” menunjukkan adanya dorongan agar kebijakan ini dapat di revisi atau dibatalkan. Berita dimulai dengan pernyataan dampak negatif PPN terhadap pendidikan, bukan dengan penjelasan alasan pemerintah menerapkan ini, hal ini memberi sudut pandang bahwa PPN 12% lebih banyak merugikan masyarakat dibanding memberikan manfaat. Berita ini menampilkan pandangan politisi sebelum menyajikan perspektif pemerintah, yang membuat berita ini lebih didominasi oleh kritis dibanding penjelasan pemerintah.</p>
<p>“PPN 12 Persen Dianggap Persulit Akses Pendidikan Berkualitas, Pemerintah Perlu Kaji Ulang” “..... penerapan PPN 12 Persen berpotensi menghambat masyarakat untuk mencari alternatif layanan pendidikan</p>	Pemilihan Kata (Diksi)	<p>Kata “persulit akses”, “meningkatkan beban”, dan “kaji ulang” menunjukkan bahwa kebijakan ini dianggap lebih merugikan rakyat. Kata “pendidikan berkualitas” digunakan untuk menyoroti bahwa sektor pendidikan yang terdampak tidak hanya sekolah biasa, namun institusi yang memberikan pendidikan lebih tinggi, ini membentuk pandangan</p>

berkualitas.”		bahwa kebijakan ini akan menghambat masyarakat dalam memperoleh pendidikan terbaik
<p>“Pemerintah diminta untuk mengkaji ulang rencana penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen.....”</p> <p>“.... kebijakan ini dikhawatirkan akan semakin mempersulit masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan berkualitas ...”</p> <p>“Anggota Fraksi PDI-P DPR RI Novita Hardini...”</p> <p>“Anggota Fraksi PKS DPR RI Ledia Hanifa Amaliah. ...”</p>	Representasi Aktor dalam Teks	Pemerintah direpresentasikan sebagai pihak yang perlu mengkaji ulang kebijakannya, bukan sebagai pengambil keputusan yang berdaulat. Masyarakat digambarkan sebagai pihak yang dirugikan oleh kebijakan ini, Politisi lebih banyak dikutip untuk memperkuat kritis terhadap kebijakan ini

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

b. Praktik Diskursif

Tabel 4.7 Analisis Praktik Diskursif Berita 2

Hal yang diamati	Temuan
Produksi Teks	Berita ini ditulis oleh Tria Sutrisna dan di edit oleh Ihsanuddin, diterbitkan di Kompas.com pada tanggal 18 Desember 2024, pukul 11:31 WIB di kota Jakarta. Berita ini menggunakan narasumber utama dari politisi yang menjabat sebagai DPR RI yang terkesan menolak kebijakan ini, dan diawali dengan menampilkan kritik yang menunjukkan bahwa arah pemberitaan lebih condong ke oposisi.
Distribusi dan Konsumsi Teks	Berita ini dipublikasikan di Kompas.com, yang memiliki basis pembaca luas dari berbagai lapisan masyarakat. Kompas.com juga memungkinkan interaksi antar pembaca terjadi dengan ruang diskusi yang lebih luas. Judul berita yang persuasif dan mengandung kritik pada pemerintah dapat

	<p>mendorong pembaca untuk melakukan interaksi di kolom komentar.</p> <p>Salah seorang pembaca Kompas.com, Pembela Kebenaran berkomentar <i>“orang kaya pun keberatan pajak naik”</i></p> <p>Lalu ada Frans purba yang berkomentar <i>“ppn 12% itu adalah selubung utk menutupi korupsi apbn menutupi beban hutang luar negeri dan menutupi biaya akibat tidak efisiennya birokrat”</i></p> <p>Dua komentar diatas menunjukkan bahwa adanya keraguan dan ketidakpercayaan yang tumbuh di badan masyarakat pada pemerintah, sehingga berakibat penolakan terhadap kebijakan kenaikan PPN ini.</p>
--	--

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

c. Praktik Sosial

Tabel 4.8 Analisis Praktik Sosial Berita 2

Tingkatan	Level	Temuan
Praktik Sosial	Situasional	Dalam berita ini, kebijakan PPN dikritik karena dianggap akan memberatkan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat. Ini menunjukkan adanya ketidakpuasan di antara masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, terutama di sektor yang dianggap penting seperti sektor pendidikan. Pemerintah melihat kebijakan ini sebagai langkah yang tepat untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun, banyaknya kritik dari berbagai pihak membuat pemerintah perlu mempertimbangkan dampak sosial lebih luas sebelum menerapkan kebijakan ini.
	Institusional	Pengenaan pajak di sektor pendidikan menunjukkan bagaimana pemerintah ingin memperluas cakupan pajak untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun, langkah ini tidak sejalan dengan prinsip pendidikan sebagai layanan publik yang semestinya didukung oleh negara. Kebijakan ini dinilai dapat memperbesar

	<p>kesenjangan pendidikan, terutama antara sekolah berstandar internasional dan sekolah nasional, masyarakat ekonomi kelas menengah akan semakin kesulitan untuk mengakses pendidikan berkualitas. Dengan mengenakan pajak pada sektor pendidikan, negara seolah menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang dikenai pajak, bukan sebagai hak dasar yang harus didukung.</p>
--	--

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

4.1.3 Berita 3 “Pengusaha Protes, Sudah Berkontribusi tetapi Ditekan PPN 12 Persen”

Tabel 4.9 Identitas Berita 3

Teks Berita
<p>Sumber: Kompas.com https://megapolitan.kompas.com/read/2024/12/18/08181121/pengusaha-protos-sudah-berkontribusi-tetapi-ditekan-ppn-12-persen</p>
<p>Waktu: 18/12/2024, 08:18 WIB</p>
<p>Tim Redaksi: Shinta Dwi Ayu, Jessi Carina</p>
<p>JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merasa terbebani dengan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen per 1 Januari 2025.</p> <p>"Sangat (terbebani) meski ini kan kelihatannya menguji kepada mereka-mereka yang dilihat lebih memiliki uang," ujar Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Apindo, Ronald Walla saat diwawancarai Kompas.com, Rabu (18/12/2024).</p> <p>Padahal, kata Ronald, para pengusaha yang dikenakan PPN 12 persen ini sebenarnya sudah banyak memberikan kontribusi ke masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah dengan banyak mempekerjakan masyarakat Indonesia.</p> <p>Dengan kenaikan PPN 12 persen, Ronald menilai, pemerintah justru memberi tekanan lebih bagi para pengusaha.</p> <p>"Sebetulnya mereka-mereka juga yang banyak memberikan kontribusi, salah satunya membuka lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia," ujar Ronald.</p> <p>"Ini semakin banyak hambatan kanan kiri atas dan bawah" tambah dia.</p> <p>Pasalnya, kenaikan 1 persen PPN saja untuk para pengusaha yang menjual barang atau jasa mewah itu nominalnya akan besar.</p>

Sementara, selain membayar pajak ke pemerintah, para pengusaha juga memiliki tanggungan untuk memberikan gaji dan tunjangan untuk para karyawannya.

Oleh sebab itu, Ronald berharap, ada pemerataan penerapan PPN 12 persen ini agar para pengusaha tidak merasa terbebani.

"Yang kami harapkan, salah satunya pemerataan. Tapi, untuk pemerataan perlu digitalisasi government yang bagus," imbuh Ronald.

Untuk diketahui, pemerintah resmi menerapkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen mulai 1 Januari 2025 sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Hal ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024).

"Sesuai dengan amanat UU HPP, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari," ujar Airlangga, dikutip dari siaran langsung akun YouTube Perekonomian RI, Senin.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah akan menerapkan kenaikan tarif PPN 12 persen khusus untuk barang dan jasa mewah.

Menurutnya, barang dan jasa mewah ini dikonsumsi oleh penduduk terkaya dengan pengeluaran menengah ke atas yang masuk dalam kategori desil 9-10.

"Kita akan menyisir untuk kelompok harga barang dan jasa yang masuk kategori barang dan jasa premium tersebut," terangnya dalam konferensi pers, Senin.

Barang dan jasa mewah yang akan dikenai PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025 antaranya sebagai berikut:

1. Rumah Sakit kelas VIP atau pelayanan kesehatan premium lainnya
2. Pendidikan standar internasional berbayar mahal atau pelayanan pendidikan premium lainnya
3. Listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3600-6600 VA
4. Beras premium
5. Buah-buahan premium
6. Ikan premium seperti salmon dan tuna
7. Udang dan crustacea premium seperti king crab
8. Daging premium seperti wagyu atau kobe yang harganya jutaan.

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

a. Analisis Teks

Tabel 4.10 Analisis Teks Berita 3

Kutipan	Linguistik	Penjelasan
<p>Judul: “Pengusaha protes, sudah berkontribusi tetapi ditekan PPN 12 persen”</p> <p>Lead: “Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merasa terbebani dengan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen per 1 Januari 2025.”</p> <p>Isi: “Sangat (terbebani) meski ini kan kelihatannya menguji kepada mereka-mereka yang dilihat lebih memiliki uang”</p> <p>“... Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Apindo, Ronald Walla ...”</p>	Struktur Teks	<p>Penggunaan kalimat “pengusaha protes” menekankan adanya ketidakpuasan golongan pengusaha terhadap kebijakan kenaikan PPN ini. Kata “Ditekan” memberi kesan negatif, seolah-olah pengusaha berada dalam posisi tertekan akibat kebijakan tersebut. Berita ini dibuka dengan pernyataan langsung mengenai protes pengusaha terhadap kenaikan PPN 12%, menekankan rasa ketidakpuasan mereka walaupun sudah berkontribusi pada negara dalam menciptakan lapangan kerja.</p>
<p>“Pengusaha protes, sudah berkontribusi tetapi ditekan PPN 12 persen”</p> <p>“... Ronald menilai, pemerintah justru memberi tekanan lebih bagi para pengusaha”</p>	Pemilihan Kata (Diksi)	<p>Kata “protes”, “Ditekan”, dan “tekanan” memberi makna adanya ketegangan antara pengusaha dan pemerintah akibat kebijakan ini, penggunaan angka “12 persen” digunakan untuk menekankan besarnya kenaikan PPN yang dianggap memberatkan oleh pengusaha.</p>
<p>“Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merasa terbebani dengan kenaikan pajak</p>	Representasi Aktor dalam Teks	<p>Pengusaha digambarkan sebagai pihak yang terdampak dan terbebani oleh kenaikan PPN meski sudah berkontribusi terhadap</p>

<p>pertambahan nilai (PPN)...” “... Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Apindo, Ronald Walla ...”</p> <p>“pemerintah resmi menerapkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN)”</p> <p>“... Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto...”</p> <p>“... Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ...”</p>		<p>perekonomian negara. Sedangkan pemerintah tidak terlalu banyak diwakilkan dalam teks, sehingga perspektif pemerintah mengenai alasan kenaikan PPN kurang tersampaikan.</p>
---	--	---

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

b. Dimensi Praktik Diskursif

Tabel 4.11 Analisis Dimensi Praktik Diskursif Berita 3

Hal yang diamati	Temuan
Produksi Teks	Berita ini ditulis oleh Shinta Dwi Ayu dan di edit oleh Jessi Carina, lalu dipublikasikan oleh Kompas.com pada tanggal 18 Desember 2024, pukul 08:18 WIB di kota Jakarta. Berita ini mengutip pernyataan dari perwakilan pengusaha yang menolak kenaikan PPN tanpa mencantumkan tanggapan dari pihak pemerintah.
Distribusi dan Konsumsi Teks	Berita ini dipublikasikan secara online sehingga memungkinkan interaksi langsung antar pembaca di kolom komentar. Pembaca dapat menafsirkan bahwa kenaikan PPN ini memberatkan pengusaha. Pembaca Kompas.com bernama palagan meninggalkan komentar yang berbunyi <i>“apa sih timbal baliknya buat rakyat atas beban yang semakin berat ini?”</i>

	<p><i>Menanggung hidup hedon para pejabat.”</i></p> <p>Bastian Manullang juga berkomentar “<i>ppn 11% atau ppn 12%, apa tidak membagongkan? Apa tidak jadi peluang oknum berbuat curang? Apa tidak membuat pelaporan pajak jadi bingung? Muliani muliani seneng banget buat orang jadi bagong!!!</i>”</p> <p>Kedua komentar tersebut menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak mendukung kebijakan kenaikan PPN ini, dikarenakan kepercayaan terhadap pemerintah yang rendah.</p>
--	--

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

c. Praktik Sosial

Tabel 4.12 Analisis Praktik Sosial Berita 3

Tingkatan	Level	Temuan
Praktik Sosial	Situasional	Kenaikan PPN menjadi 12% diterapkan dalam kondisi pemulihan pasca pandemi, dimana pengusaha menganggap kebijakan ini memberatkan karena dapat meningkatkan beban produksi, harga barang, dan biaya operasional
	Institusional	Kompas.com lebih banyak menampilkan suara dari pihak pengusaha yang menolak kebijakan PPN 12%, perwakilan dari organisasi Apindo menunjukkan keberatannya terhadap kebijakan ini karena merasa pengusaha ditekan oleh pemerintah padahal sudah berkontribusi dalam perekonomian negara.

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

4.2 Pembahasan

Keputusan pemerintah dalam menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% menimbulkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat. Banyak yang merasa bahwa kebijakan ini terlalu membebani rakyat, terutama bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah terlebih di tengah situasi ekonomi pasca-pandemi

yang belum sepenuhnya pulih. Kompas.com sebagai salah satu media daring besar di Indonesia turut memberitakan polemik ini, dengan banyak artikel yang menampilkan pandangan kritis terhadap kebijakan tersebut.

Berdasarkan pendekatan analisis wacana kritis model *Norman Fairclough*, dapat dilihat bagaimana pemberitaan ini membentuk wacana. Menurut *Fairclough*, ada tiga hal penting dalam menganalisis sebuah wacana, yaitu teks (linguistik), praktik diskursif, dan praktik sosial. Melihat tiga aspek tersebut, adapun temuan dalam penelitian ini antara lain:

4.2.1 Analisis Teks

Dalam pemberitaannya, Kompas.com banyak menggunakan kata-kata seperti “membebani masyarakat”, “menghantam daya beli”, dan “melemahkan daya beli”. Pemilihan kata ini membangun pandangan bahwa kenaikan PPN membawa dampak negatif bagi masyarakat. Misalnya, berita berjudul “Mengapa Sebaiknya Pemerintah Membatalkan PPN 12%?”, langsung menyoroti dampak buruk dari kebijakan ini dan mendorong pembaca untuk melihatnya sebagai kebijakan yang perlu ditinjau ulang.

Kompas.com juga mengangkat tentang dampak kebijakan ini terhadap sektor pendidikan Indonesia dalam berita berjudul “PPN 12 Persen Dianggap Persulit Akses Pendidikan Berkualitas, Pemerintah Perlu Kaji Ulang”. Berita ini cenderung menampilkan kenaikan PPN sebagai hambatan besar bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan berkualitas. Pemilihan kata seperti “persulit akses” dan “meningkatkan beban” membuat kebijakan ini semakin dilihat sebagai ancaman bagi pendidikan berkualitas.

Selain itu, dalam berita berjudul “Pengusaha Protes, Sudah Berkontribusi tetapi Ditekan PPN 12 Persen”, Kompas.com lebih banyak mengutip suara pengusaha yang merasa dirugikan. Kata “ditekan” dalam judul berita menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya berdampak pada masyarakat ekonomi bawah, namun juga pada dunia usaha.

4.2.2 Analisis Praktik Diskursif

Berdasarkan pendekatan analisis wacana kritis model *Norman Fairclough*, dapat dilihat bagaimana pemberitaan ini membentuk opini publik. Dalam analisis teks, Kompas.com lebih banyak mengutip pernyataan tokoh masyarakat, Politisi, dan Perwakilan organisasi pengusaha yang menolak kenaikan PPN ini, seperti tokoh Gerakan Nurani Bangsa Alissa Wahid, Anggota Fraksi PDI-P DPR RI Novita Hardini, dan Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Apindo, Ronald Walla. Sedangkan pendapat dari pakar ekonomi atau perwakilan pemerintah kurang ditonjolkan, sehingga membuat sudut pandang yang muncul condong ke arah kritik.

Berita ini diproduksi oleh jurnalis Kompas.com dan dipublikasi secara daring. Hal ini memungkinkan berita menyebar dengan cepat dan memancing interaksi dan komentar pembaca. Banyak komentar dari masyarakat yang menunjukkan sikap kontra dan tidak puas terhadap kebijakan pemerintah untuk menaikkan PPN ke 12%, kesulitan untuk menerima kebijakan ini juga didukung oleh rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa komentar seperti ini:

susilo kristanto:

“kalo blm bisa mensejahterakan rakyatnya jgn memalak rakyat dgn pajak tinggi, contoh Vietnam.”

Palagan:

“apa sih timbal baliknya buat rakyat atas beban yang semakin berat ini? Menanggung hidup hedon para pejabat.”

Bastian Manullang:

“ppn 11% atau ppn 12%, apa tidak membagongkan? Apa tidak jadi peluang oknum berbuat curang? Apa tidak membuat pelaporan pajak jadi bingung? Muliani muliani seneng banget buat orang jadi bagong!!!”

4.2.3 Analisis Praktik Sosial

Pajak merupakan instrumen utama negara dalam mengumpulkan pendapatan, namun, dalam kondisi ekonomi yang belum stabil akibat dampak pandemi, kebijakan ini justru memicu perdebatan mengenai dampaknya terhadap kelompok ekonomi menengah ke bawah. Kompas.com turut membentuk wacana bahwa kebijakan ini lebih merugikan masyarakat daripada memberikan manfaat jangka panjang.

Selain itu, pemberitaan ini mencerminkan bagaimana masyarakat semakin kritis terhadap kebijakan pemerintah, terutama dalam isu ekonomi. Ruang diskusi daring yang memungkinkan interaksi publik memperkuat pandangan bahwa pemerintah harus lebih transparan dan responsif terhadap kekhawatiran rakyat, bahkan diharapkan dapat melibatkan pendapat rakyat dalam setiap keputusan ke depannya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam era digital, kebijakan publik tidak

hanya ditentukan oleh keputusan pemerintah, tetapi juga oleh tekanan opini publik yang terbentuk melalui media dan platform komunikasi daring.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Keputusan pemerintah dalam menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% telah menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Banyak yang merasa bahwa kebijakan ini terlalu membebani rakyat, terutama bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah yang belum sepenuhnya pulih.

Kompas.com sebagai salah satu media daring besar yang ada di Indonesia menunjukkan sikap kritis terhadap pemerintah serta membentuk wacana bahwa kebijakan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% itu akan menimbulkan dampak yang negatif dibandingkan positif. Hal ini dapat dibuktikan melalui analisis wacana kritis model *Norman Fairclough* dari aspek teks, pemilihan kata di berita Kompas.com lebih menekankan dampak negatif kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dari aspek praktik diskursif, pemberitaan ini lebih banyak menggunakan narasumber tokoh yang menolak kebijakan ini, sementara pandangan pemerintah kurang ditampilkan. Sedangkan dari aspek praktik sosial, kebijakan ini mencerminkan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks ekonomi yang belum stabil, serta bagaimana media dan opini publik semakin berperan dalam mempengaruhi kebijakan.

Pemberitaan tentang PPN 12% di Kompas.com tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi, tetapi juga sebagai tempat diskusi dan pembentukan opini publik. Media memiliki peran yang sangat penting dalam mbingkai sebuah kebijakan dan mempengaruhi pandangan masyarakat dalam menafsirkannya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya maupun bagi pihak-pihak yang berkaitan serta penelitian dalam bidang analisis wacana kritis:

5.2.1 Bagi Pemerintah

- a. Media Kompas.com sebagai salah satu media besar di Indonesia diharapkan lebih memperhatikan keseimbangan dan keberagaman sudut pandang dalam menyajikan sebuah berita. Dalam memberitakan kebijakan yang berdampak luas, penting bagi media untuk mengutip pernyataan dari segala golongan masyarakat agar mencerminkan realitas yang lebih utuh.

5.2.2 Bagi Masyarakat

- a. Universitas diharapkan mendorong mahasiswa untuk lebih kritis terhadap pemberitaan media melalui penguatan kurikulum dan forum diskusi ilmiah. Dengan begitu, mahasiswa dapat memahami bagaimana media membentuk wacana dan mempengaruhi persepsi publik.

5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambah sumber berita dan media online lain untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas
- b. Selain menggunakan analisis wacana kritis *Norman Fairclough*, metode lain seperti analisis framing atau analisis semiotika dapat digunakan untuk melihat bagaimana suatu wacana dibentuk dan diterima oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S., Ginting, R., & Asih, A. (2021). Strategi Komunikasi Pemasaran iNews TV Sumut dalam Meningkatkan Segmentasi Pemirsa. *PERSEPSI: Communication Journal*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.30596/persepsi.v%vi%i.5665>
- Damayani Pohan, D., & Fitria, U. S. (2021). Jenis Jenis Komunikasi. In *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies* (Vol. 2, Issue 3). <http://pusdikra-publishing.com/index.php/jrss>
- Efendy, E., Zakaria, Azlisa, & Anggrana. (2023). Dasar Dasar Penulisan Berita. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5.
- Gerin Rio Pranata. (2022). *Analisis wacana kritis model teun. A. Van dijk dalam lirik lagu preamble the brandals*.
- Hadi, M. F., & Suratnoaji, C. (2023). Opini Digital Isu Kenaikan PPN 11%. *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 4(2), 415–430. <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v4i2.3821>
- Hidayat, A., & Ruslan, A. (2018). Penerapan teori ekonomi politik media dalam program fashion heritage di tv mnc fashion tv satelit indovision. *Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran Dan Penelitian*, 4(2), 11–22. www.journal.uniga.ac.id11
- Idah Nufajriya Awwalin, L. S. (2024). Analisis Respon Publik Melalui Sosial Media Facebook terhadap Wacana Kenaikan Pajak Pasca Pilpres 2024 pada Media Pemberitaan. *Jurnal Rumpun Akuntansi Publik*.
- Insani, D. F., & Zamzamy, A. (2023). Analisis Framing Pemberitaan Media Online CNBC Indonesia.com dan Kompas.com Mengenai Dampak Lingkungan Pemindahan Ibu Kota Negara. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.
- Irfan, F. (2020). *Analisis wacana kritis norman fairclough pada berita festival cisadane di koran satelit news*.
- Kiki Astria, K., Khairul Nuzuli, A., & Handayani, F. (2021). Etika Jurnalistik, Perempuan dan Pemberitaan Pelecehan Seksual di Media Online. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 3(2). <https://jurnalfuad.org/index.php/ishlah/index>
- Kustiawan, W., Far, J. ', Siregar, A. A., Purba, A. M., Universitas, M., Negeri, I., Utara, S., Dakwah, F., Komunikasi, D., Williem Iskandar, J., Percut, P. V, &

- Tuan -Medan, S. (2022). Manajemen Media Online. *Juitik*, 2(2).
<http://journal.sinov.id/index.php/juitik/indexHalamanUTAMAJurnal:https://journal.sinov.id/index.php>
- Maulida, R. (2024, July 26). *PPN: Pengertian, Tarif & Jenis Barang yang Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai*. OnlinePajak.Com.
- Mukarom, Z., Dakwah, J. M., Dakwah, F., Uin, K., Gunung, S., & Bandung, D. (2020). *Teori-Teori Komunikasi*. Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
<http://md.uinsgd.ac.id>
- Nugraini, A., & Fauzan, A. (2024). Hubungan Kenaikan Tarif PPN terhadap Minat Beli Masyarakat. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 1(12), 945–955.
<https://doi.org/10.62335>
- Purba, B., & Gasperz, S. (2020). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar. *Yayasan Kita Menulis*.
- Putri, F. (2018). *Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough Berita Hoax Rush Money Di Media Sosial Facebook*. 1–77.
- Rengganis, Cenderamata, C., & Darmayanti, N. (2019). *Analisis wacana kritis fairclough pada pemberitaan selebriti di media daring*.
- Safitri, K. (2024, December 28). PPN Naik jadi 12 Persen, Daya Beli Masyarakat Makin Lemah. *Kompas.Com*.
- Suprobo, T., Sari, S. D., & Siahainenian, R. (2016). *Analisis framing media online dalam pemberitaan profildan kebijakan menteri susi pudjiastuti*.
<https://twitter.com/search?f=realtime&q=%23menterisusi&src=typd>
- Thariq, M., & Anshori, A. (2017). Komunikasi Adaptasi Mahasiswa Indekos. *Jurnal Interaksi*, 1. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/interaksi>
- Tjendana, E., & Sulfitri, V. (2025). *Universitas Ibnu Sina (uis) Analisis Dampak Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Penjualan PT. Sokenko Maju Jaya*.
- Zulfahmi. (2017). *Pola Komunikasi Dalam Upaya Pelestarian Reog Ponorogo Pada Orang Jawa Di Desa Percut Sei Tuan*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Maulana Ismail
Tempat, Tanggal Lahir : Sintang, 5 Februari 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Perkawinan : Belum Menikah
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Amat Tirto, Pasar X, Tembung
Email : maulana.ismail.2003@gmail.com

Data Orang Tua

Nama Ayah : Iman Sukoco
Nama Ibu : Eva Anggraini Saswi
Pekerjaan Ayah : TNI-AD
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan Formal

2009-2015 : SDN 104203 Bandar Khalipah
2015-2018 : SMPN 1 Blangkejeren
2018-2021 : SMAN 2 Lhokseumawe
2021-2025 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

LAMPIRAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/DAN-PT/AK-K/PT/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20210 Telp. (061) 6622499 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 @umsumedan @umsumedan @umsumedan @umsumedan @umsumedan @umsumedan

Sk-1

PERMCHONAN PERSetujuan
 JUDEL SKRIPSI

Kepada Yth Bapak/Ibu Medan, 20.....
 Program Studi
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:
 Nama Lengkap : MAULANA ISMAIL
 NPM : 2103110099
 Program Studi : ILMU KOMUNIKASI
 SKS diperoleh : 119... SKS, IP Kumulatif : 3,59

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Analisis Framing media massa dalam Peliputan program maulan siang gratis di Detik.com dan Kompas.com	
2	Analisis wabacika kritis pada pemberitaan kenaikan PPN 12% di media online Kompas.com	✓ 30 Des 2021
3	Analisis Isi Pemberitaan Sengketa Pilkada SUMUT tahun 2024 di harian waspada	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :
 1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
 2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.
 Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi:
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

061.21.311

Pemohon,

Maul

(... MAULANA ISMAIL ...)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi.....

Dr. Ribut Priadi, S.Sos, M.I.Kom
 NIDN: 0120057303

Medan, tanggal 31 Desember 2024

Ketua

Program Studi.....

NIDN:





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/KU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisp.umsu.ac.id> fisp@umsu.ac.id [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#)

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 3/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Komunikasi tertanggal : **31 Desember 2024**, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : MAULANA ISMAIL
N P M : 2103110099
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) : **ANALISIS WACANA KRITIS PADA PEMBERITAAN KENAIKAN PPN 12% DI MEDIA ONLINE KOMPAS.COM**

Pembimbing : **Dr. RIBUT PRIADI, S.Sos., M.I.Kom.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Komunikasi: 061.21.311 tahun 2024.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 31 Juni 2025.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 02 Rajab 1446 H
02 Januari 2025 M



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.

Dekan,

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.
NIDN. 0030017402





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/BK/BAN-PT(Ak.KP/PT/UK/2022)
 Pusat Administrasi, Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20233 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 https://fkip.umsu.ac.id fkip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 20....

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU ;

Nama lengkap : MAULANA ISMAIL
 N P M : 2103110099
 Program Studi : ILMU KOMUNIKASI

mengajukan permohonan mengikuti **Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah)** yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor:3...../SK/IL3-AU/UMSU-03/F/20.25. tanggal31 DESEMBER 2024..... dengan judul sebagai berikut :

ANALISIS WACANA KRITIS PADA PEMBERITAAN KENAIKAN PPN 12% DI MEDIA ONLINE KOMPAS.COM

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proopsosal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

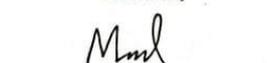
Diketahui oleh Ketua
 Program Studi


 (AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom)
 NIDN:0127048401

Menyetujui
 Pembimbing


 (DR. RIDUT PRIADI, S.Sos., M.I.Kom)
 NIDN:0120057303

Pemohon,


 (MAULANA ISMAIL)





UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 353/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Komunikasi
Hari, Tanggal : Jumat, 07 Februari 2025
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
1	MAULANA ISMAIL	2103110099	Assoc. Prof. Dr. PUJI SANTOSO, S.S., M.SP.	Assoc. Prof. Dr. RIBUT PRIADI, M.I.Kom.	ANALISIS WACANA Kritis PADA PEMBERTAAN KEAKSIAN PPN 12% DI MEDIA CHILIE KOMPAS.COM
2	MUHAMMAD GABRIEL FAHREZA	2103110102	AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom.	Assoc. Prof. Dr. FAUSTYNA, S.Sos., M.M., M.I.Kom.	STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN CITRA PT SANDBAR GUNAJAYA DI KOTA MEDAN
3	ALMER SUHADA MANURUNG	2103110202	CORRY NOVIRICA AP SINAGA, S.Sos., M.A.	Assoc. Prof. Dr. PUJI SANTOSO, S.S., M.SP.	ANALISIS PRODUKSI PROGRAM SIARAN SOKIH DI SALAM TV
4	YOLA FRANSISKA SIREGAR	2103110289	FAIZAL HAMZAH LUBIS, S.Sos., M.I.Kom.	AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom.	MANAJEMEN KOMUNIKASI ORGANISASI KORPS PASUKAN SMA NEGERI 2 (KOPASDA) TEBING TINGGI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI ANGGOTA
5	MUHAMMAD RIFQI FATHIN	2103110006	Dr. MUHAMMAD THARIQ, S.Sos., M.I.Kom.	Assoc. Prof. Dr. PUJI SANTOSO, S.S., M.SP.	ANALISIS MARKETING STRATEGI PADA VIDEO REWIND (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) INDONESIA 2023 PADA CHANEL YOUTUBE INDONESIA CREATOR

Medan, 06 Februari 2025
09 Februari 2025 M



(Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, M.SP.)





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MATELIS PENDIDIKAN, PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi / Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1911/UK/BAN-PT/AK.KP/PT/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 622401 - 66224507 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fkip.umku.ac.id> fkip.umku.ac.id umsumedan.com umsumedan.com umsumedan.com umsumedan.com

Sik-5

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

Nama lengkap : MAULANA ISMAIL
N P M : 2103110099
Program Studi : ILMU KOMUNIKASI

Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) : ANALISIS WACANA KRITIS PADA PEMBERITAAN KENAIKAN PPN 12% DI MEDIA ONLINE KOMPAS.COM

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	31-12-2024	ACC Judul	
2.	8-1-2025	Bimbingan Bab 1	
3.	16-1-2025	Bimbingan bab 2	
4.	21-1-2025	Bimbingan bab 3	
5.	30-1-2025	ACC mengikuti sempro	
6.	24-2-2025	Bimbingan pasca sempro	
7.	28-2-2025	Bimbingan bab 4 dan 5	
8.	10-3-2025	Revisi bab 4 dan 5	
9.	21-3-2025	Bimbingan bab 4 dan 5	
10.	14-4-2025	ACC Sidang meja hijau	

Medan, 2025

Dekan,

Assoc. Prof. Dr. H. Amin Saleh, M.S.P.
NIDN: 003017402

Ketua Program Studi,

Akhwar Anshori, S.Sos., M.I.Kom
NIDN: 0127048401

Pembimbing,

Assoc. Prof. Dr. Ribut Priadi, S.Sos., M.I.Kom
NIDN: 0120057303



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNDANGAN/PANGILAN UJIAN TUGAS AKHIR

(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 724/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Komunikasi
Hari, Tanggal : Selasa, 22 April 2025
Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Ujian Tugas Akhir
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
16	RAUDAH DAULAY	2103110072	Assoc. Prof. Dr. FAUSTYNA, S.Sos., M.M., M.I.Kom.	FAIZAL HAMZAH LUBIS, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. RIBUT PRIADI, S.Sos., M.I.Kom.	ANALISIS VISUALISASI KONTEN PROMOSI INSTAGRAM @SONU_PAJI DALAM MENARIK PERHATIAN PENONTON
17	RANI SORAYA	2103110090	Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom.	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.	Assoc. Prof. Dr. FAUSTYNA, S.Sos., M.M., M.I.Kom.	EFEKTIVITAS KOMUNIKASI KRISIS DALAM MENGGATASI KELUHAN PUBLIK SEBAGAI UPAYA MEMPERTAHKAN CITRA PERUSAHAAN DI PT. FREIGHT LINER MEDAN
18	MAULANA ISMAIL	2103110099	Assoc. Prof. Dr. FAUSTYNA, S.Sos., M.M., M.I.Kom.	AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. RIBUT PRIADI, S.Sos., M.I.Kom.	ANALISIS WACANA KRITIS PADA PEMBERTAAN KENAIKAN PPN 12% DI MEDIA ONLINE KOMPAS.COM
19	BAYU SETIAWAN	2103110792	Assoc. Prof. Dr. YAN HENDRA, M.Si.	FAIZAL HAMZAH LUBIS, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. RIBUT PRIADI, S.Sos., M.I.Kom.	PENERAPAN KODE ETIK PROFESI HUMAS PROTOKOL DALAM MENERIMA TAMU RESMI DI DPRD SUMUT
20	HIZKY REZA BUANA	2103110290	Dr. RIBUT PRIADI, S.Sos., M.I.Kom.	AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom.	Assoc. Prof. Dr. YAN HENDRA, M.Si.	PENGARUH PEER PRESSURE KELUARGA TERHADAP PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA SISWA MAN 1 MUJEL MEDAN

Not.ifs Skidang.

1. Menyerikan oleh:
Gj. Rektor
Gj. Wakil Rektor



Assoc. Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum.

Medan, 22 Syawal 1446 H
21 April 2025 M



Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom.

